

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(Studi Penelitian Deskriptif di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu
Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah)**



Disusun Oleh:

**DONARTUS HENDRIANATA PUTRA PRATAMA
19520097**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2025**

**PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(Studi Penelitian Deskriptif di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu
Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan**

**Disusun Oleh:
DONARTUS HENDRIANATA PUTRA PRATAMA
19520097**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Februari 2025
Jam : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Dosen Pembimbing

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
Penguji Samping I

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A
Penguji Samping II

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Donartus Hendrianata Putra Pratama

Nim : 19520097

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Penelitian Deskriptif di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 19 Februari 2025

Yang Menyatakan



Donartus Hendrianata Putra Pratama

19520097

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Donartus Hendrianata Putra Pratama
NIM : 19520097
Telp : 081345345875
Email : donartushendrianata@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Penelitian Deskriptif di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah)”**.

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta 19 Februari 2025



Donartus Hendrianata Putra Pratama
19520097

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin

Tanggal : 17 Februari 2025

Jam : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Dosen Pembimbing

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si

Penguji Samping I

Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A

Penguji Samping II

Mengetahui,

Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Donartus Hendrianata Putra Pratama

Nim : 19520097

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Penelitian Deskriptif di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 19 Februari 2025

Yang Menyatakan

Donartus Hendrianata Putra Pratama

19520097

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Donartus Hendrianata Putra Pratama
NIM : 19520097
Telp : 081345345875
Email : donartushendrianata@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Penelitian Deskriptif di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah)”**.

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta 19 Februari 2025

Donartus Hendrianata Putra Pratama
19520097

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkehendak dan memberikan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Penelitian Deskriptif di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah)”** Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing terhadap Skripsi ini.
4. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan meluangkan atas waktu, perhatian, dan masukan yang sangat berharga selama proses sidang skripsi ini. Ulasan dan saran yang diberikan sangat membantu saya untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ilmiah ini.
5. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.I.P., M.P.A selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan meluangkan atas waktu, perhatian, dan masukan yang sangat berharga selama proses sidang skripsi ini. Ulasan dan saran yang diberikan sangat membantu saya untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ilmiah ini.

6. Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
7. Kedua Orang Tua ku tercinta Bapak Bernadus Juang Adi Sucipto dan Ibu Antonia Tina yang telah memberikan dukungan materi, semangat yang tak terhingga kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Kakak dan adik tercinta dan tersayang Margareta Nera Rukmana, Katarina Febrianti dan Christiana Laura yang selalu nelson nanya “kapan lulus,kapan selesai,skripsimu sampai mana?” akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan pulang ketemu saudara tersayang.
9. Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan mematok harus lulus tepat waktu dan selalu nanya kapan sidang? Dan kapan wisuda?. Terima kasih atas dukungan dari kalian.
10. Pemerintah Desa Riam Batang, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan memfasilitasi penelitian saya dengan sebaik mungkin selama di Desa tersebut.
11. Seluruh Penulis dalam karya ilmiahnya yang dikutip dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini

Yogyakarta 19 Februari 2025

Penulis



Donartus Hendrianata Putra Pratama

MOTTO

“Orang-orang yg menabur dengan mencururkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yg berjalan maju dengan menangis sambil metabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil bawa berkas-berkasnya.”

(Mazmur 126:5-6)

“Jangan takut, Aku menyertai engkau, jangan gelisah, Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan””

(Yesaya 41:10)

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”

(Windah Basudara)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini juga selesai tidak terlepas dari bantuan dan dukungan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orangtua penulis bapak Bernadus Juang Adi Sucipto dan ibu Antonia Tina. Terimakasih karena Ayah dan Ibu telah memberikan kepercayaan kepada penulis dan selalu memberikan dukungan baik untuk kesehatan jiwa dan raga penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan karya berupa Skripsi ini. Sungguh, penulis merasa bangga dapat menyelesaikan perkuliahan ini karena itu semua berkat kasih sayang Ayah dan Ibu.
2. Kepada kakak saya Mmargareta Nera Rukmana, Katarina Febrianti dan adik saya Christiana Laura. Terimakasih atas bantuan semangat yang luar biasa dari kalian berikan dalam proses penulisan Skripsi ini. Berkat kalian, penulis semakin merasa termotivasi untuk cepat menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu.
3. Keluarga besar penulis yang sungguh amat sangat besar sehingga tidak dapat ditulis satu per satu. Terimakasih atas pertanyaan kapan sidang? Kapan lulus? serta doa kalian selama ini. Tindakan baik kalian terhadap

penulis turut menuntun semangat penulis sampai dengan saat ini, terutama disaat penulis sedang kekurangan semangat dalam untuk menyelesaikan perkuliahan. Pertanyaan kapan selesai kuliah dan kapan sidang inilah yang memberi dorongan kepada penulis untuk berkerja keras menyelesaikan kuliah di perantauan.

4. Teman-teman, sahabat, support sistem dan dosen. Berkat hal-hal positif baik yang berikan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya berupa skripsi untuk mendapat gelar Sarjana.
5. Pemerintah Desa Riam Batang, yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dan memfasilitasi penelitian saya dengan sebaik mungkin selama di Desa tersebut.
6. Teman-teman kampus STPMD “APMD”, yang selama ini turut berperan dalam penelitan yang dilakukan oleh penulis, dan dukungan yang kuat kepada penulis.
7. Almamater STPMD “APMD”, yang menjadi kebanggaan penulis selama menempuh pendidikan jenjang Sarjana, mampu membentuk karakter penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Fokus Penelitian	7
F. Literatur Review	7
G. Kerangka Konsep	16
1. Kapasitas Pemerintah Desa	16
2. Implementasi SIKEUDES	22
H. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
2. Unit Analisis	26
3. Teknik Pengumpulan Data	29
4. Teknik Analisis Data	30

BAB II GAMBARAN UMUM DESA RIAM BATANG	33
A. Profil Desa	33
1. Sejarah Terbentuknya Desa Riam Batang	33
B. Kondisi Demografi Desa Riam Batang	34
1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	35
2. Berdasarkan Kelompok Usia	35
3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan	36
4. Berdasarkan Mata Pencarian	37
C. Geografis	38
D. Sarana dan Prasarana	40
1. Sarana Transportasi	40
2. Prasarana Air Bersih	40
3. Prasarana Komunikasi dan Informasi	41
4. Prasarana Listrik dan Penerangan	41
5. Sarana dan Prasarana Perkantoran	42
6. Prasarana Olahraga	42
7. Prasarana Pendidikan	43
8. Kesehatan	43
E. Keadaan Poilitik	44
F. Pemeritah Desa Riam Batang	44
1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Riam Batang	44
2. Badan Permusyawaratan Desa Riam Batang	49
BAB III ANALISIS PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA RIAM BATANG KECAMATAN SERUYAN HULU KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	52
A. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa di Desa Riam Batang	52
1. Rekrutmen	53
2. Pelatihan	57
3. Penggajian	62

4. Kondisi Lingkungan Kerja	64
B. Pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam	
Batang	68
1. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa	68
2. Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	74
C. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa	79
1. Komunikasi	80
2. Sumberdaya	81
3. Sikap	82
4. Struktur birokrasi	83
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan	28
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 2. 2 Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia	36
Tabel 2. 3 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 2. 4 Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian.....	38
Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa Riam Batang	42
Tabel 2. 6 Prasaran Olahraga Desa Riam Batang	43
Tabel 2. 7 Prasarana Pendidikan Desa Riam Batang	43
Tabel 3. 1 Sarana dan Prasarana Desa Riam Batang	67

INTISARI

Pengelolaan keuangan Desa sangat vital dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, dalam rangka pengawasan penggunaan keuangan DESA, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan suatu aplikasi yang bernama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dengan adanya aplikasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran mengenai kewajiban penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di seluruh Desa di Indonesia. Untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa agar berjalan efektif dan tepat sasaran, diperlukan sumber daya yang memadai dan profesional dalam operasionalnya. Desa Riam Batang merupakan salah satu Desa yang telah mengimplementasikan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa untuk membantu mengelola keuangan Desanya, namun implementasinya sedikit terkendala karena minimnya sumber daya manusia untuk mengoperasikan aplikasi ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah Desa dalam mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan Teknik analisis data pada penelitian ini dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi dan tabel yang diperoleh peneliti di lapangan dan dari literatur yang digunakan peneliti.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan dalam pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pengimplementasian aplikasi Sistem Keuangan Desa. dalam pengelolaan keuangan Desa dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pada tahap pelaporan. Meskipun demikian dalam pengimplementasian aplikasi SISKEUDES sedikit terkendala karena hanya dioperasikan oleh Kepala Desa saja sehingga pengerjaannya kurang efisien. Meskipun dalam pengimplementasian aplikasi siskeudes ditunjang dengan dengan disediakannya sarana dan prasarana, terciptanya kondisi lingkungan kerja yang baik, komunikasi yang baik antar pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pemberian pelatihan serta sikap dari pemerintah desa yang menerima akan adanya penggunaan teknologi baru akan tetapi pengimplementasian aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang terkendala karena kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES.

Kata Kunci: Kapasitas, Pemerintah Desa, Implementasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan Desa menjadi sangat vital dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan yang dapat menyajikan informasi realisasi anggaran dan keadaan keuangan pemerintah Desa hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran serta dapat digunakan untuk menyusun anggaran dan mengevaluasi kebijakan pada tahun berikutnya. Dilansir dari www.bpkp.go.id masih terdapat Desa yang belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik Desa. Selain itu terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan dana Desa seperti penyaluran dana yang tidak optimal, pelaporan keuangan yang kurang terpercaya dan kurangnya kontrol terhadap pengeluaran dana Desa. Hal ini menunjukkan perlu adanya sistem untuk mendukung pengelolaan keuangan Desa.

Berdasarkan masalah di atas dalam memanfaatkan teknologi informasi yang ada di Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). BPKP ini bekerjasama dengan Pemerintah Kementerian Dalam Negeri untuk meluncurkan aplikasi tersebut. BPKP dan KEMENDAGRI kemudian menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 6 November 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa kemudian aplikasi ini

baru diluncurkan pada tahun 2016. Dengan kesepakatan tersebut KEMENDAGRI kemudian mengeluarkan surat edaran tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi SISKEUDEDES ini di seluruh Desa di Indonesia.(dikutip dari www.bpkp.go.id)

Aplikasi SISKEUDEDES bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Selain itu dengan pengimplementasian SISKEUDEDES diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektifitas, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa, serta dapat mempermudah pencatatan keuangan, meminimalisir resiko kesalahan administratif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau penggunaan keuangan Desa.

Dilansir dari www.bpkp.go.id mengatakan bahwa hingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, penerapan aplikasi SISKEUDEDES telah mencapai sebanyak 95,06% dari seluruh Desa di Indonesia. Sedangkan bimbingan teknis aplikasi SISKEUDEDES telah dilaksanakan pada 73.751 Desa di 430 kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penelitian (Sulistyawati, 2019), bahwa implementasi SISKEUDEDES sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan adanya ketidaksesuaian dan ketidakterbukaan pada pertanggungjawaban dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat.

Desa Riam Batang merupakan salah satu Desa yang sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES, terdapat dampak positif yang sudah terasa seperti pengerjaan laporan keuangan menjadi lebih efisien. Di sisi lain di Desa Riam Batang dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES masih kurang optimal, salah satunya karena sering terjadinya *error* dalam aplikasi saat penginputan data, masih lemahnya sumberdaya manusia dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES yang berbasis teknologi informasi, kurangnya pengetahuan aparatur Desa dalam pengoperasian komputer, faktor usia yang mana perangkat Desa banyak yang sudah berusia lanjut, faktor pendidikan yang mana banyak dari aparatur Desa yang hanya tamatan SD, serta banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya aplikasi SISKEUDES.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa masalah utama yang dihadapi aparatur Desa dalam mengelola keuangan Desa dengan memanfaatkan aplikasi SISKEUDES adalah SDM yang masih rendah. Dengan diterapkannya SISKEUDES ini diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan Desa Riam Batang. Dalam hal ini peneliti akan membahas kapasitas pemerinta Desa dalam implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang dengan menggunakan perspektif *Governability*. Kooiman (2010) menjelaskan kapasitas memerintah (*governability*) merupakan suatu ekspresi *governance* dalam arti penyesuaian yang absah (*legitimate*) dan efektif atas *governing needs to capacities* dan *governing capacities to needs*. Menurut *need* bukan hanya sekedar sesuatu yang ada di dalam masyarakat dan *capacity* bukan hanya sekedar

menunjukkan pemerintah. *Need* dan *capacity* dalam porsinya, polanya kompleksitas dan saling dilihat pada waktu yang sama sebagai sosial dan politik, publik dan privat, negara dan masyarakat dalam hubungan yang saling bergantung (Kooiman, 2010; Kooiman, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut *governability* berkaitan dengan otoritas dan kapasitas pemerintah

Setiawan (2021) mengatakan ada lima macam penguatan kapasitas agar Desa menjadi Desa mandiri dan kuat; *pertama*, kapasitas dalam regulasi (mengatur) adalah kemampuan pemerintah Desa untuk mengatur Desa dan isinya (wilayah, kekayaan, dan penduduk) menggunakan peraturan Desa dengan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di Desa. *Kedua*, kapasitas ekstraksi adalah suatu kemampuan untuk mengumpulkan, menggerakkan dan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh Desa seperti aset fisik, aset alam, aset manusia, aset sosial, aset keuangan dan aset politik. Kemampuan ekstraksi juga mencakup kemampuan Kepala Desa dalam menggabungkan beberapa aktor dalam pemerintah Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat. *Ketiga*, yaitu kapasitas distributif merupakan suatu kemampuan pemerintah Desa dalam membagi beberapa sumberdaya yang dimiliki oleh Desa secara seimbang dan merata berdasarkan prioritas yang menjadi kebutuhan di masyarakat Desa. *Keempat*, yaitu kapasitas responsif merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki seperti memiliki daya tanggap yang cepat terhadap aspirasi masyarakat sebagai landasan dalam melakukan perencanaan dalam

pembangunan Desa. *Kelima*, yaitu kapasitas membangun kerjasama merupakan kemampuan pemerintah Desa untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka mendukung kapasitas ekstraktif.

Berdasarkan hal di atas dalam penelitian ini akan menggunakan peningkatan kapasitas yang kedua kapasitas ekstraksi, karena salah satu permasalahan yang dialami di Desa Riam Batang dalam pengimplementasian aplikasi SISKEUDES yaitu pada keterbatasan sumberdaya manusia yang profesional sehingga perlu untuk dilakukan pengembangan kapasitas pada pemerintah Desa Riam Batang dalam rangka pengimplentasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Dalam kapasitas ekstraksi terdapat salah satu peningkatan kepasitas yaitu pengembangan kapasitas manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat permasalahan ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah Desa dalam implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya pengembangan kapasitas pemerintah Desa dalam implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang Kecamatan Seruya Hulu Kabupaten Seruyan?
2. Untuk mendeskripsikan pengimplementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang Kecamatan Seruya Hulu Kabupaten Seruyan?
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pelaporan keuangan yang telah dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem keuangan Desa serta meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat bagaimana aplikasi SISKEUDES ini diaplikasikan dengan semestinya serta sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam bagaimana implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan evaluasi untuk inovasi dan pengembangan aplikasi SISKEUDES ini ke depannya.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan peneliti yang mana digunakan untuk memfokuskan penelitian ini agar data dan informasi yang diteliti sesuai dengan kebutuhan dan menghindari bias terhadap data yang diambil oleh peneliti. Dalam penelitian ini adapun yang menjadi fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa di Desa Riam Batang.
2. pengimplementasian aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang
3. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

F. Literatur Review

1. *Jurnal: Linda Grace Loupatty, Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa /Negeri Di Kota Ambon, jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10. No. 1 April 2022.*

Dalam artikel jurnal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif pada 30 Desa/negeri di Kota Ambon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan aplikasi SISKEUDES sudah berjalan efektif dan menganalisis dampak dari

penerapan aplikasi SISKEUDES. Hasil pada penelitian ini adalah penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Kota Ambon telah dilaksanakan dengan baik. Terdapat 25 Desa dari 30 Desa sudah melakukan prosedur pengelolaan keuangan Desa dengan tertib dan disiplin dan juga terdapat 5 Desa lainnya masih dalam tahap melakukan perbaikan tata kelola keuangan Desa. Akan tetapi dalam implementasi SISKEUDES di 30 Desa ini terdapat hambatan diantaranya kurangnya sarana dan prasarana seperti komputer dan lemahnya SDM dalam penggunaan IT. Perbedaan pada penelitian ini adalah ada penelitian yang akan dilakukan adalah akan membahas bagaimana implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa serta bagaimana upaya meningkatkan kapasitas pemerintah Desa.

2. *Jurnal :Hadiat Trihutomo Wibowo, Deni Triyanto, Adi Sutojo, Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur: Journal of Social Politics and Governance Vol.2 No.2 Desember 2020.*

Dalam artikel jurnal ini, peneliti menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan model Edward III sebagai kerangka analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi aplikasi SISKEUDES di Desa Guru Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES di Desa tersebut masih kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung pengoperasian aplikasi serta rendahnya kompetensi aparatur Desa dalam menggunakannya, sehingga

pelaksanaannya tidak berjalan optimal. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus peningkatan kapasitas pemerintah Desa serta adanya perubahan lokasi penelitian.

3. *Jurnal: Nilla Trisna, Reli Wahyuni, Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Pemerintahan Gampong Bilang Neauang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, Jurnal Ius Civile (vol 3, No 1, April 2019)*

Dalam artikel jurnal pada penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang mengacu pada norma norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi aplikasi SISKEUDES pada Gampong Blang Neuang belum terlaksana dengan baik pemerintah Desa masih menggunakan cara manual dalam membuat laporan keuangannya hal ini dikarenakan minimnya pemahaman SDM aparatur Desa dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES serta terkendala oleh jaringan internet yang tidak ada di Gampong sehingga membuat aparatur Desa menggunakan cara manual. Implementasi aplikasi SISKEUDES pada Gampong Blang Neuang belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada upaya peningkatan kapasitas pemerintah Desa dalam implementasi aplikasi SISKEUDES.

4. *Jurnal: Hayati, Rahmi. "Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan*

Desa (SISKEUDES) di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong". PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis 5.2 (2021): 99-110.

Dalam artikel jurnal pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan aplikasi SISKEUDES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Tantaringin, Padangin, dan Desa Harus, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong telah berjalan secara efektif dalam pengelolaan keuangan Desa. Aplikasi ini mendukung berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Selain itu, penggunaan SISKEUDES juga membantu mempermudah pekerjaan pemerintah Desa. Namun, masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, khususnya dalam perencanaan, karena aplikasi ini belum sepenuhnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

5. *Jurnal: Trisnadewi, A. A. A. E., A mlayasa, A. A. B., & Rupa, I. W. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja SISKEUDES dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi, Jurnal Akuntansi Vol. 10, No.1, Februari2020*

Dalam artikel jurnal pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja sistem keuangan Desa. Sementara itu, program pendidikan dan pelatihan berpengaruh

negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja sistem keuangan Desa. Selain itu, dukungan manajemen puncak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja sistem tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

6. *Jurnal: Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. Penerapan sistem keuangan Desa (SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*13(4), 2018, 578-583.

Dalam artikel jurnal pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data hasil wawancara dan dokumentasi yang didapat dari kantor Desa. Hasil pada penelitian ini adalah penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah berjalan dengan baik akan tetapi terdapat kendala yaitu sering terjadinya error saat penginputan data serta masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput kedalam sistem dan masih menggunakan cara manual. Perbedaan pada penelitian ini adalah terdapat pembaharuan pada lokasi penelitian yang berbeda pada penelitian yang akan peneliti lakukan berlokasi di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan. Sedangkan persamaan pada penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penerapan SISKEUDES di Desa.

7. *Jurnal: Permana, G. P. L., & Mudiyantri, N. W, Analisis Faktor Kesuksesan Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dengan Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Diperbarui oleh Delone dan Mclean di Kabupaten Gianyar, Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 13, Nomor 1 2021.*

Dalam artikel jurnal pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan Model DeLone dan McLean, yang mencakup enam aspek utama: Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Penggunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat Bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan, kualitas informasi berdampak positif terhadap penggunaan, dan kualitas layanan juga berpengaruh positif terhadap penggunaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada model yang digunakan. Penelitian ini menerapkan model DeLone dan McLean, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan indikator keberhasilan implementasi berdasarkan model Edward III.

8. *Jurnal: Fitriani, F., & Hayati, R, Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dilihat dari Aspek Sumber Daya di Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur. JAPB, Volume 4 Nomor 2, 2021.*

Dalam artikel jurnal pada penelitian ini peneliti menggunakan

metode penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Kalamus, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, ditinjau dari aspek sumber daya, telah terlaksana dengan sangat baik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada peran sumber daya manusia dalam penerapan aplikasi SISKEUDES, sementara penelitian yang akan dilakukan akan membahas implementasi aplikasi SISKEUDES serta upaya peningkatan kapasitas pemerintah Desa.

9. *Jurnal: Sulistyowati, S., & Fitriyah, E, Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Studi Kasus pada Desa Besuki Kesamatan Besuki Kabupaten Situbondo, International Journal of Social Science and Business, (2019).*

Dalam artikel jurnal pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan Desa telah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dalam aspek pertanggungjawaban, di mana informasi tersebut belum dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada lokasi penelitian. Penelitian yang akan dilakukan akan berfokus di Desa Riam Batang sebagai objek kajian yang baru.

10. *Jurnal: PURNAMA, Dendi; AZIZAH, Siti Nur. Implementasi Sistem Keuangan Desa Berbasis Akuntansi Keperilakuan. Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 3, No 2 2019.*

Dalam artikel jurnal pada penelitian ini menggunakan metode eksplanatori dengan indikator yang mencakup sikap, motivasi, persepsi, emosi, serta pelatihan, dan variabel implementasi sistem keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan pelatihan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi sistem keuangan Desa. Sementara itu, motivasi, persepsi, dan emosi tidak berpengaruh terhadap implementasi sistem tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku pengguna aplikasi SISKEUDES, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah Desa dalam mengimplementasikan aplikasi tersebut.

11. *Jurnal: Faâ, Y., Muchsin, S., & Abidin, A. Z. (2019). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). Jurnal Respon Publik, 13(4), 61-67.*

Dalam artikel jurnal pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia di kantor Kelurahan Pandanwangi mempunyai kemampuan kerja

dan profesional yang cukup baik, namun masih ada beberapa pegawai di Kantor Kelurahan Pandanwangi belum mempunyai kemampuan walaupun sudah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Faktor Pendukung dalam pengembangan kapasitas SDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yakni mengutamakan kepentingan umum dan selalu meningkatkan mutu kerja, sedangkan faktor penghambat pengembangan kapasitas SDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yakni kurangnya tenaga ahli dalam hal penguasaan Teknologi Informasi dan tidak adanya kegiatan pengarsipan.

Berdasarkan *literatur review* di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian aplikasi SISKEUDES sudah berjalan dengan baik akan tetapi terdapat masalah yang dihadapi dalam pengimplentasian aplikasi SISKEUDES seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengimplementasiaannya, kurang kompetennya aparatur Desa dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES , kurangnya pemahaman aparatur Desa dalam mengoperasikan SISKEUDES, pada aplikasi SISKEUDES pada bidang perencanaan aplikasi ini masih belum mampu menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat, sering terjadinya *error* pada saat pengimputan data pada aplikasi SISKEUDES.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini akan lebih berfokus pada pengembangan

sumberdaya pemerintah Desa dalam pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut dalam upaya memaksimalkan pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda yaitu dengan mengambil lokasi penelitian yang baru. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Riam Batang, Kecamatan Seruya Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Kemudian sudut pandang dalam penelitian ini adalah kapasitas Pemerintah (*Governability*).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti akan meneliti “Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi Aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan.

G. Kerangka Konsep

1. Kapasitas Pemerintah Desa

a. Kapasitas

Morison dalam Hariyanto (2001:42) mengatakan *capacity building* adalah suatu proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Brown (2001:25) mendefinisikan *capacity building* sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi, atau sistem dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Merilee S. Grindle (1997), sebagaimana dikutip dalam Buchari dkk. (2017), menyatakan bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan kapasitas (*capacity building*) berfokus pada tiga dimensi utama, yaitu pengembangan sumber daya manusia (*development of human resources*), penguatan organisasi (*strengthening organizations*), dan reformasi institusi (*reformation of institutions*).

Berdasarkan hal tersebut salah satu dimensi dalam pengembangan kapasitas adalah pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Sebagaimana dikutip dalam Buchari dkk. (2017) Merille S. Grindle (1997) mengungkapkan bahwa pengembangan kapasitas sumberdaya manusia memfokuskan pada ketersediaan tenaga kerja yang profesional dan memiliki keterampilan teknis yang dapat dilakukan dengan melalui rekrutmen, pelatihan, penggajian, dan kondisi lingkungan kerja

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi pembangunan kapasitas sumberdaya manusia memfokuskan pada ketersediaan tenaga profesional dan personal teknis dengan melakukan rekrutmen, pelatihan, penggajian, dan kondisi lingkungan kerja.

1) Rekrutmen

Menurut Badan Kepegawaian Negara (2009) rekrutmen adalah suatu Badan Kepegawaian Negara (2009) mendefinisikan rekrutmen sebagai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencari dan mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, Noe et al. (dalam Wibowo, R., & Alhalim, A. A., 2018) menyatakan bahwa rekrutmen merupakan aktivitas organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menarik tenaga kerja potensial. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah proses pencarian dan seleksi tenaga kerja yang profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2) Pelatihan

Menurut Hamali & Budihastuti (2019) dalam Hendra, H. (2020), pelatihan merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, sehingga mereka dapat bekerja secara profesional di bidangnya. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah proses pengembangan kemampuan individu melalui berbagai aktivitas yang mendukung peningkatan keterampilan dan pengetahuan.

3) Pengupahan/Sistem Penggajian

Pengupahan adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seseorang atas jasa dan hasil

kerjanya (Astiwi, A. R., 2018). Karena gaji merupakan sesuatu yang sangat penting bagi si pemberi jasa maka sistem sangat diperlukan dalam mengelola dan mengatur gaji. Seorang penerima gaji pada umumnya diberikan pada saat setiap akhir bulan dan jumlahnya tetap Haryono, 2012 (dalam Astiwi, A. R., 2018).

4) Kondisi Lingkungan Kerja

Kondisi lingkungan kerja yang kondusif sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat lingkungan kerja yang memainkan peran krusial dalam menentukan produktivitas, kepuasan karyawan, dan kesuksesan keseluruhan. Lingkungan kerja yang ideal menciptakan suasana yang mendukung, menginspirasi, dan memotivasi individu untuk berkolaborasi secara efektif serta mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Mangkumanegara (2005:105) faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan kerja yaitu kondisi fisik kerja, kondisi psikologis kerja, dan kondisi temporer kerja.

Kapasitas erat kaitannya dengan peningkatan kemampuan seseorang dan peningkatan kemampuan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan individu tetapi juga dengan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan efektif.

b. Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan serta

kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang pelaksanaannya berfokus pada pengelolaan Desa. Menurut Maria Eni Surasih (2002:23), Pemerintahan Desa adalah suatu proses di mana upaya masyarakat Desa dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat setempat.

Pemerintahan Desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan serta tata kelola pemerintahan di tingkat Desa. Tugas utamanya adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang berkualitas, serta menciptakan kesejahteraan, ketenteraman, dan keadilan bagi masyarakatnya (S. Hajar dkk., 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa diterbitkan sebagai langkah lanjutan dari pelaksanaan Undang-Undang Desa. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari:

- 1) Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lainnya, merupakan pejabat pemerintahan Desa yang memiliki wewenang, tugas, dan tanggung

jawab dalam mengelola pemerintahan Desa serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dan dibantu oleh Staf Sekretaris. Staf Sekretaris Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan. Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

3) Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan adalah bagian yang membantu kepala Desa dalam menjalankan tugas di wilayah tertentu. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan, kemampuan keuangan Desa, serta mempertimbangkan luas wilayah, karakteristik geografis, tingkat kepadatan penduduk, dan ketersediaan sarana prasarana pendukung. Tugas ini dijalankan oleh kepala dusun atau sebutan lainnya. Pelaksana kewilayahan bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan Desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan warga Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau sebutan lainnya, yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

4) Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis adalah bagian yang membantu kepala Desa dalam menjalankan tugas operasional. Struktur pelaksana teknis terdiri dari maksimal tiga seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan. Sementara itu, jumlah minimalnya terdiri dari dua seksi, yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

2. Implementasi SIKEUDES

a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah sebuah tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga membutuhkan perencanaan untuk mencapai hasil akhir yang baik dari sebuah program atau kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Mulyadi (2015:12) (dalam Dewantari dkk., 2021) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.

Dalam mengimplementasi sebuah kebijakan membutuhkan banyak sekali faktor-faktor untuk menunjang keberhasilan kebijakan tersebut salah satunya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta aktor aktor yang kompeten di bidangnya yang menjadi bagian dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Edward III, (dalam Dewantari dkk., 2021) beberapa

indikator keberhasilan implementasi sebuah kebijakan yaitu sebagai berikut:

1) Komunikasi

Suatu kebijakan akan diimplementasikan dengan baik dan efektif jika si pelaksana memahami apa yang diperintah, untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan komunikasi. Komunikasi menjadi sangat penting karena komunikasi menjadi bagian dalam penyampaian perintah sehingga perintah yang disampaikan si pembuat kebijakan dapat tersampaikan dengan baik kepada yang diperintah sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik.

2) Sumberdaya

Sumberdaya juga tidak kalah pentingnya karena untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan harus mempunyai sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia atau aktor aktor yang kompeten untuk menjalankan kebijakan tersebut selain sumberdaya sarana dan prasaran yang memadai juga diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan suatu kebijakan.

3) Disposisi/Sikap

Sikap juga merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan dengan baik apabila si penerima kebijakan mau dan paham apa yang diperintahkan oleh kebijakan

tersebut dan juga penerapan sebuah kebijakan akan berhasil atau optimal jika aparat pelaksananya memiliki perilaku yang baik dan menjalankan perintah sesuai dengan prosedur yang ada dengan begitu pengimplentasiannya dapat maksimal.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang baik juga berperan penting dalam pengimplementasian sebuah kebijakan hal ini berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi tersebut jika pembagian tugas sesuai dengan keahlian dan bekerja sesuai tugas serta menjalankan prosedur yang baik maka program kebijakan yang diberikan kepada organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik.

b. Sistem Keuangan Desa

Sebelum adanya aplikasi SISKEUDES ini Pemerintah Desa Riam Batang dalam mengerjakan pelaporan keuangan masih dilakukan dengan cara manual. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi BPKP mengembangkan sebuah aplikasi yang bernama SISKEUDES yang kemudian bekerjasama dengan KEMENDAGRI untuk meluncurkan aplikasi tersebut.

Aplikasi SISKEUDES dikembangkan bersama oleh BPKP dan KEMENDAGRI. Aplikasi ini mulai dikembangkan pada tahun 2015 dan akhirnya diluncurkan pada tahun 2016 dan diberikan surat edaran

agar seluruh Desa di Indonesia dapat menggunakan aplikasi SISKEUDES. Aplikasi SISKEUDES dibuat agar terciptanya transparansi, keefektifan dan efisien dalam membuat laporan keuangan Desa serta memudahkan Desa dalam membuat laporan keuangannya.

Laporan yang dihasilkan dalam proses pengelolaan keuangan Desa oleh aplikasi SISKEUDES, sebagai berikut:

- 1) Laporan penatausahaan
- 2) Bukti penerimaan
- 3) Surat permintaan pembayaran
- 4) Surat setoran pajak
- 5) Laporan penganggaran
- 6) Dan dokumen lain-lainnya

Tujuan utama dari dibuat dan diterapkannya aplikasi SISKEUDES adalah untuk memudahkan pemerintah Desa dalam proses pengelolaan keuangan dan dapat melaksanakan proses pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan berdasarkan fakta yang sedang terjadi dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menjelaskan data yang diperoleh yang selanjutnya akan

dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan. Menurut Moleong (2007:6) yang memaknai penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan, menganalisis kapasitas pemerintah Desa dalam implementasi SISKEUDES di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan.

Data yang akan dikumpulkan adalah tentang pengembangan kapasitas pemerintah Desa dalam implementasi SISKEUDES di Desa Riam Batang. Dari hal tersebut maka penulis akan mendapatkan suatu informasi dalam bentuk deskripsi.

2. Unit Analisis

Dalam penelitian ini unit yang menjadi unit analisis, sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan. Pemilihan lokasi ini peneliti menimbang beberapa faktor diantaranya karena belum ada peneliti yang meneliti terkait judul penelitian ini di Desa Riam Batang dan juga karena Desa Riam Batang merupakan Desa yang sudah menerapkan aplikasi SISKEUDES ini.

b. Objek Penelitian

Dalam pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa diperlukan sumberdaya yang kompeten dan profesional untuk

mendukung keberhasilannya desa riam batang merupakan salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengembangan kapasitas pemerintah Desa dalam implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan.

c. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 6 orang informan subyek penelitian berupa Kepala Desa Riam Batang, Bendahara Desa, Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kaur Perencanaan, Kaur Tatausaha dan Umum, dan warga Desa yang terlibat dalam pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengimplementasian aplikasi Sistem Keuangan Desa. Dalam penelitian ini dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik *proposive sampling* yaitu mengambil orang yang dipilih oleh peneliti melalui beberapa pertimbangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. dalam penggunaan metode ini diharapkan subjek penelitian dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan objek penelitian. Pemilihan narasumber didasarkan pada kriteria tertentu seperti mereka yang terlibat secara langsung dalam pengembangan kapasitas pemerintah desa dan pengimplementasian aplikasi Sistem keuangan Desa, serta memiliki otoritas.

Untuk mendapatkan data yang akurat tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan overview atau penjajakan terhadap calon informan penelitian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa informan yang akan dipilih nantinya benar-benar merepresentatif dalam memberikan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penjajakan ini yang akan menjadi dasar penentuan informan yang akan dilibatkan lebih lanjut dalam penelitian.

Tabel 1. 1 Data Informan

No	Nama	Usia (Thn)	Tingkat Pendidikan	Jabatan
1	B Juang As	48	SMA	Kepala Desa
2	Icayanto	31	SMA	Bendahara Desa
3	Sabirin	35	SMP	Anggota BPD
4	Marijon	54	SMA	Kaur Perencanaan
5	Armanda	46	SMA	Kaur Tatausaha dan Umum
6	Ana	33	SMA	Warga Desa

Sumber: Data Lapangan Peneliti

Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Metode wawancara yang akan peneliti lakukan adalah dengan metode wawancara bebas terpimpin, yang mana pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin yang mana dalam pelaksanaannya pewawancara sudah memiliki pedoman tentang apa yang akan ditanyakan secara garis besar.

Berdasarkan hal di atas informan yang akan diwawancarai oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait dengan pembahasan

dalam penelitian ini adalah perangkat Desa dan masyarakat Desa Riam Batang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono terdapat 4 macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, gabungan atau triangulasi. Di Dalam penelitian teknik pengumpulan data sangat penting agar mendapatkan data yang akurat. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Pada awalnya peneliti melakukan observasi awal guna untuk mendapatkan gambaran umum tentang Desa Riam Batang. kemudian Peneliti melakukan pengamatan langsung dilapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kegiatan observasi yang peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi bagaimana pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa serta mengamati bagaimana Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam rangka pengimplementasian Aplikasi Sistem keuangan Desa yang ada di Desa Riam Batang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan antar 2 individu atau lebih yang menjadi narasumber dan pewawancara. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai alat utama untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek

yang diteliti. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu merancang daftar pertanyaan wawancara yang relevan dan spesifik untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang kemudian memperoleh data dan informasi terkait pengembangan kapasitas pemerintah desa dan pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa. dalam proses wawancara peneliti berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman agar narasumber dapat dengan nyaman mengutarakan pendapatnya.

c. Dokumentasi

Dokumen yang didapat dalam penelitian ini berupa informasi tentang desa, serta gambar gambar yang menunjukkan pengimplementasian aplikasi sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang.

4. Teknik Analisis Data

Dalam mengolah data diperlukan analisis dimana data yang telah didapat akan dianalisis untuk menyimpulkan persoalan yang diteliti. Dalam Shidiq & Choiri,2019;87 Miles dan Huberman mengatakan terdapat 3 tahapan dalam analisis data yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ada 3 komponen, yaitu:

a. Reduksi Data

Setelah data dan informasi yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti mulai memilah

data yang telah diperoleh dari lapangan, dengan fokus utama untuk memilih informasi yang relevan dan mendukung tujuan penelitian. Proses reduksi data ini melibatkan penyaringan informasi yang dianggap tidak esensial atau kurang berkaitan langsung dengan topik penelitian, sehingga hanya data yang benar-benar penting dan signifikan yang akan dipertahankan. Selanjutnya, setelah data yang relevan terpilah dan dipilih, peneliti mulai merangkum informasi tersebut dalam bentuk yang lebih terstruktur. Proses ini bertujuan untuk mempermudah analisis lebih lanjut dan mengidentifikasi informasi kunci yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penyusunan data ini dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan temanya,

b. Penyajian Data

Setelah melalui proses reduksi maka tahap selanjutnya yaitu tahap penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini berupa narasi deskriptif. Tentang pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa. Pada tahap ini peneliti memastikan bahwa informasi yang telah dipilih dan dirangkum dapat ditampilkan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami agar mendapatkan gambaran dari penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah melalui kedua proses di atas tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi dari data yang telah dipilih. Pada

tahap ini, peneliti merumuskan pemahaman awal tentang pengembangan kapasitas dalam implementasi aplikasi sistem keuangan desa berdasarkan temuan-temuan yang telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan cara menghubungkan temuan-temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah disusun sebelumnya, serta menganalisisnya untuk menarik kesimpulan yang relevan mengenai topik penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA RIAM BATANG

A. Profil Desa

1. Sejarah Terbentuknya Desa Riam Batang

Diceritakan asal muasal daerah peDesaan diawali dengan kedatangan seseorang yang bernama Basing Kenteler yang berasal Kalimantan Barat tepatnya dari Mentatai Kampung Nanga Mawak Kecamatan Serawai Kalimantan Barat. Pada waktu itu Basing Kenteler pergi untuk menyelamatkan diri dari cengkaman penjajah dan masa bahaya kelaparan pada masa penjajahan Belanda yang akhirnya menetap di Tumbang Ritan. Setelah itu para tokoh adat bersepakat mencari tempat yang lebih baik untuk memungkinkan berkembangnya sebuah Desa dengan pindah di sebelah Hilir Tumbang Ritan yang bernama Riam Batang, dan lama kelamaan berkembang menjadi sebuah Desa yang bernama Desa Riam Batang. Asal usul nama Desa Riam Batang dikarenakan bahwa di dekat Desa tersebut ada sungai yang bernama sungai Seruyan dan di tengah arus sungai tersebut ada kayu manggris (bahasa Dayak-nya *kayu dohok*) melintang di daerah arus sungai tersebut sampai pada saat ini masih ada. Pada saat itu Desa Riam Batang dipimpin oleh seorang yang bernama Basing Kenteler dan diganti oleh anaknya yang bernama Nanggung Basing menjadi Kepala Kampung.

Seiring berjalannya waktu Desa Riam Batang menjadi ramai dengan adanya pendatang yang berasal dari Kalimantan Barat yang dikenal dengan nama Nanggung Basing, Tauh Basing, Runjat Basing, Simpat Basing, dan lain-lain yang menjadi pendiri Desa Riam Batang.

Dengan kekayaan sumberdaya alamnya yang melimpah dan adanya kerukunan warga masyarakat kehidupan masyarakat Desa Riam Batang betul-betul damai dan tentram sehingga berkembang dengan baik. Keturunan yang berasal dari Kalimantan Barat inilah merupakan warga asli Desa Riam Batang sampai saat ini. Demikianlah sekilas asal usul keberadaan Desa Riam Batang sebagai dasar pengetahuan kita bersama dengan harapan semoga ke depan masyarakat Desa Riam Batang dapat menata masa depan yang lebih baik untuk mencapai cita-cita yang luhur menjadi Desa mandiri serta berbudaya, bermartabat dan modern di masa yang akan datang.

Secara administrasi Desa Riam Batang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Kondisi Demografi Desa Riam Batang

Penduduk Desa Riam Batang berasal dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda, yang mana mayoritas penduduk di Desa Riam Batang berasal dari suku Dayak.

Masyarakat Desa Riam Batang memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020, mencatatkan bahwa jumlah penduduk Desa Riam Batang berjumlah 293 jiwa, yang terdiri dari 69 kepala keluarga dengan jumlah laki-laki sebanyak 164 jiwa dan perempuan sebanyak 129 jiwa. Berikut adalah komposisi demografi Desa Riam Batang:

1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-Laki	164	55,97
2	Perempuan	129	44,03
Total		293	100,00

Sumber: RPJMDes Desa Riam Batang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Desa Riam Batang berjumlah 293 jiwa yang terdiri dari 164 jiwa penduduk laki-laki dan 129 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan data tersebut masyarakat di Desa Riam Batang didominasi oleh laki-laki dengan selisih 35 jiwa.

2. Berdasarkan Kelompok Usia

Berdasarkan jumlah penduduk di Desa Riam Batang jumlah penduduk di Desa Riam Batang berjumlah 293 jiwa, kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan kelompok umur. Berikut tabel pengelompokkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur:

Tabel 2. 2 Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No	Kel. Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	0 – 1	2	0,68
2	1 – 4	16	5,47
3	5 – 14	40	13,65
4	15 – 39	122	41,64
5	40 – 64	97	33,10
6	65 >	16	5,46
Total		293	100,00

Sumber: RPJMDes Desa Riam Batang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dengan usia produktif (16-64 tahun) mendominasi di Desa Riam Batang sebanyak 219 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk menurut umur yang paling sedikit adalah penduduk dengan umur 0-4 tahun dengan jumlah 18 jiwa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa SDM yang ada sangat memadai untuk mendukung kemajuan Desa dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif.

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di Desa Riam Batang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	125	42,66
2	Tamat SD	51	17,41
3	SLTP	36	12,29
4	SLTA	21	7,17
5	D3	8	2,73
6	S1	11	3,75
7	Belum Sekolah	12	4,09
8	Belum Tamat SD	29	9,90
Total		293	100,00

Sumber: RPJMDes Desa Riam Batang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Masyarakat di Desa Riam Batang didominasi oleh penduduk yang tidak tamat SD (Sekolah Dasar) sebanyak 125 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Riam Batang masih lemah, secara kuantitas jumlah SDM yang ada sangat memadai akan tetapi kuantitas ini tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang masih kurang.

4. Berdasarkan Mata Pencaharian

Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda beda tak terkecuali dalam sektor mata pencaharian. Di Desa Riam Batang memiliki berbagai macam mata pencaharian warga Desa. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Riam Batang:

Tabel 2. 4 Penduduk berdasarkan Mata Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	192	65,53
2	Karyawan Swasta	8	2,73
3	Guru	11	3,75
4	Peternak	7	2,39
5	Tukang	4	1,37
6	Bidan	2	2,68
7	Perawat	1	0,34
8	Belum bekerja	68	23,21
Total		293	100,00

Sumber: RPJMDes Desa Riam Batang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Riam Batang didominasi oleh petani sebanyak 192 jiwa, belum bekerja 68 jiwa, dan guru sebanyak 11 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Riam Batang mayoritas bekerja sebagai petani hal ini didukung oleh tingkat kesuburan tanah yang memungkinkan untuk dilakukan aktivitas berladang sangat baik.

C. Geografis

Desa Riam Batang secara administrasi pemerintahan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Luas Wilayah Desa Riam Batang \pm 2.008 Ha yang secara geografis berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Paku Kecamatan Seruyan Hulu.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Katingan
- Sebelah Selatan yaitu berbatasan dengan Desa Tumbang Taberau Kecamatan Seruyan Hulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumbang Darap Kecamatan Seruyan Hulu.

Desa Riam Batang bertopografi berbukit-bukit dan dataran yang dimanfaatkan petani sebagai lahan untuk berladang dan membuka lahan perkebunan. Wilayah Desa ini mengikuti pinggir sungai Seruyan yang berada di sebelah kiri Mudik sungai Seruyan. Kondisi lahan di wilayah Desa didominasi oleh dataran tinggi, sehingga situasi pemukiman terpusat di satu tempat yang memiliki permukaan yang lebih tinggi “natai” di tepi sungai, sebagaimana umumnya Desa-Desa di Kalimantan dalam upaya mengatasi minimnya akses transportasi darat. Untuk akses menuju Desa Riam Batang dapat ditempuh menggunakan transportasi darat dan air melalui sungai Seruyan. Untuk jarak dari Desa Riam Batang menuju ibukota Kecamatan membutuhkan waktu (± 4 jam) melalui perjalanan air menggunakan speedboat yang melewati 8 Desa sedangkan untuk menggunakan kendaraan bermotor dan mobil dapat ditempuh melalui jalan perusahaan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Untuk jarak dari Desa Riam Batang menuju ibukota kabupaten membutuhkan waktu (1-2 hari) menggunakan transportasi darat dan air.

D. Sarana dan Prasarana

Sarana merujuk pada sesuatu berupa alat yang dapat digunakan untuk mendukung suatu kegiatan. Sedangkan prasarana adalah infrastruktur dasar untuk mendukung sarana untuk berfungsi. Sarana dan prasarana memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Meskipun tidak sekompleks di kota-kota besar, keberadaan fasilitas-fasilitas ini sangat vital untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Desa.

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Riam Batang meliputi sarana dan prasarana transportasi, air bersih, komunikasi dan informasi, listrik dan penerangan, perkantoran, olahraga, pendidikan, dan kesehatan.

1. Sarana Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi sangat penting untuk mendukung suatu pembangunan di Desa. Untuk mendukung mobilitas di Desa, berbagai sarana transportasi digunakan oleh penduduk. Sarana transportasi yang digunakan oleh penduduk di Desa Riam Batang berupa motor, mobil, dan speedboat. Untuk sarana transportasi masyarakat banyak menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil untuk kegiatan sehari-hari.

2. Prasarana Air Bersih

Prasarana air bersih menjadi salah satu elemen yang mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Air bersih menjadi kebutuhan

bagi setiap warga masyarakat. Desa Riam Batang memiliki prasarana air bersih berupa 4 tangki air bersih yang nantinya akan disalurkan kerumah rumah warga.

3. Prasarana Komunikasi dan Informasi

Prasarana komunikasi dan informasi memainkan peran penting dalam menghubungkan masyarakat dengan dunia luar dan memfasilitasi aliran informasi di antara warga. Di Desa Riam Batang memiliki 1 buah menara telekomunikasi atau antena pemancar sinyal yang didapatkan dari bantuan KOMINFO pada tahun 2022. Meskipun sudah memiliki menara telekomunikasi, untuk kualitas jaringan yang diterima masyarakat masih sangat rendah.

4. Prasarana Listrik dan Penerangan

Keberadaan sarana dan prasarana listrik serta penerangan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Dahulu, Desa hanya mengandalkan lampu minyak dan lilin untuk penerangan di malam hari. Keterbatasan ini membatasi aktivitas masyarakat setelah matahari terbenam.

Desa Riam Batang memiliki prasarana listrik berupa satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dibangun pada tahun 2013 akan tetapi baru diaktifkan kembali pada tahun 2019. Keberadaan pembangkit listrik ini sangat membantu kebutuhan penerangan yang ada di Desa Riam Batang.

5. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Desa Riam Batang memiliki satu unit kantor Desa yang menjadi tempat kerja kepala Desa dan perangkat Desa. Desa Riam Batang juga mempunyai satu unit gedung balai Desa sebagai tempat pertemuan umum Desa kedua gedung tersebut masih digunakan sampai saat ini dengan kondisi gedung yang masih sangat baik. Kedua gedung tersebut sudah dilengkapi dengan air bersih dan juga listrik.

Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Perkantoran Desa Riam Batang

No	Inventaris	Jumlah (Unit)	Kondisi
1	Komputer	3	Baik
2	Laptop	4	Baik
3	Printer	3	Baik
4	Kendaraan Dinas	1	Baik
5	Genset	1	Baik
6	Pengeras Suara	1	Baik
7	Meja	11	Baik
8	Kursi	20	Baik
9	Almari Arsip kayu	1	Baik

Sumber: RPJMDes Desa Riam Batang

6. Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olahraga sangat dibutuhkan untuk kegiatan jasmani masyarakat. Desa Riam Batang memiliki beberapa sarana dan prasaran olahraga. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki:

Tabel 2. 6 Prasarana Olahraga Desa Riam Batang

No	Prasarana Olahraga	Jumlah (Buah)
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bola Volli	1
3	Lapangan Bulu Tangkis	1

Sumber: RPJMDes Desa Riam Batang

7. Prasarana Pendidikan

Pendidikan sangat diperlukan untuk kemajuan suatu bangsa oleh karena itu sarana dan prasarana pendidikan harus diperhatikan untuk menunjang proses belajar dan mengajar. Desa Riam Batang memiliki beberapa sarana dan prasarana pendidikan. Berikut sarana dan prasarana yang ada di Desa Riam Batang:

Tabel 2. 7 Prasarana Pendidikan Desa Riam Batang

No	Gedung	Jumlah (Unit)
1	Gedung PAUD	1
2	Gedung TK	1
3	Gedung Sekolah Dasar	1
4	Gedung SMP	1

Sumber: RPJMDes Desa Riam Batang

8. Kesehatan

Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu aspek krusial yang mendukung kesejahteraan warganya. Bagi warga fasilitas kesehatan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa adanya akses kesehatan yang layak warga terutama lansia, anak anak, ibu hamil rentan terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dan ditangani dengan baik.

Sarana kesehatan seperti klinik atau puskesmas memegang peranan penting dalam memberikan layanan medis. Desa Riam Batang memiliki satu gedung Pustu sebagai tempat berobat warga dan memiliki 2 tenaga kesehatan perawat dan bidan. Sehingga dengan adanya Pustu ini sedikit banyak dapat membantu masyarakat dalam berobat.

E. Keadaan Politik

Kehidupan di Desa Riam Batang kebanyakan masyarakat masih memiliki hubungan keluarga satu sama lain. Kehidupan politik di Desa Riam Batang memiliki dinamika yang unik yang terikat pada ikatan keluarga. Sehingga dengan keadaan politik seperti ini membentuk kelompok-kelompok politik antar keluarga. Dalam pemilihan kepala Desa misalnya beberapa keluarga membentuk aliansi untuk mendukung salah satu kepala Desa, dukungan dari keluarga-keluarga besar akan menguntungkan salah satu calon. Keputusan untuk memilih salah satu calon kepala Desa tentunya tidak hanya berdasarkan visi dan misi akan tetapi pada hubungan keluarga. Ketegangan politik terkadang terjadi sehingga menimbulkan gesekan-gesekan sosial di masyarakat akan tetapi masyarakat sudah terbiasa dengan kondisi yang terjadi demikian.

F. Pemerintah Desa Riam Batang

1. Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Riam Batang

Pemerintahan Desa Riam Batang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh seorang Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang

lainnya yang bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan tujuan yang telah ditentukan bersama.

a. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa berperan sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tugas utamanya mencakup pelaksanaan pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Kepala Desa menjalankan tugasnya dengan berbagai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pemerintahan Desa, yang mencakup pengelolaan administrasi pemerintahan, penetapan peraturan Desa, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di peDesaan, melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, berupa melaksakan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masyarakat, mengajak partisipasi masyarakat, melaksanakan sosial budaya masyarakat, melaksanakan aktifitas keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- 4) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat, berupa melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat pada bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- 5) Melaksanakan dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat serta lembaga lainnya.

b. Tugas dan Fungsi Sekretariat Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 pada ayat (2) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- 1) Menjalankan tugas ketatausahaan, termasuk pengelolaan tata naskah, administrasi surat-menyurat, pengarsipan, dan ekspedisi.
- 2) Mengelola urusan umum, seperti administrasi perangkat Desa, penyediaan fasilitas kantor dan perangkat Desa, persiapan rapat, pengelolaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, serta layanan umum.
- 3) Mengurus keuangan Desa, mencakup administrasi keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, serta pengelolaan penghasilan kepala Desa, perangkat

Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.

- 4) Melaksanakan perencanaan Desa, yang meliputi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa, pendataan untuk pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

- 1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendudukan pelaksana tugas-tugas Pemerintahan. Kepala Urusan memiliki fungsi sebagai berikut:
- 2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum berfungsi dalam pengelolaan ketatausahaan, seperti pengelolaan tata naskah, administrasi surat-menyurat, pengarsipan, ekspedisi, serta penataan administrasi perangkat Desa. Selain itu, bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas perangkat Desa dan kantor, persiapan rapat, pengelolaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, serta pelayanan umum.
- 3) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.

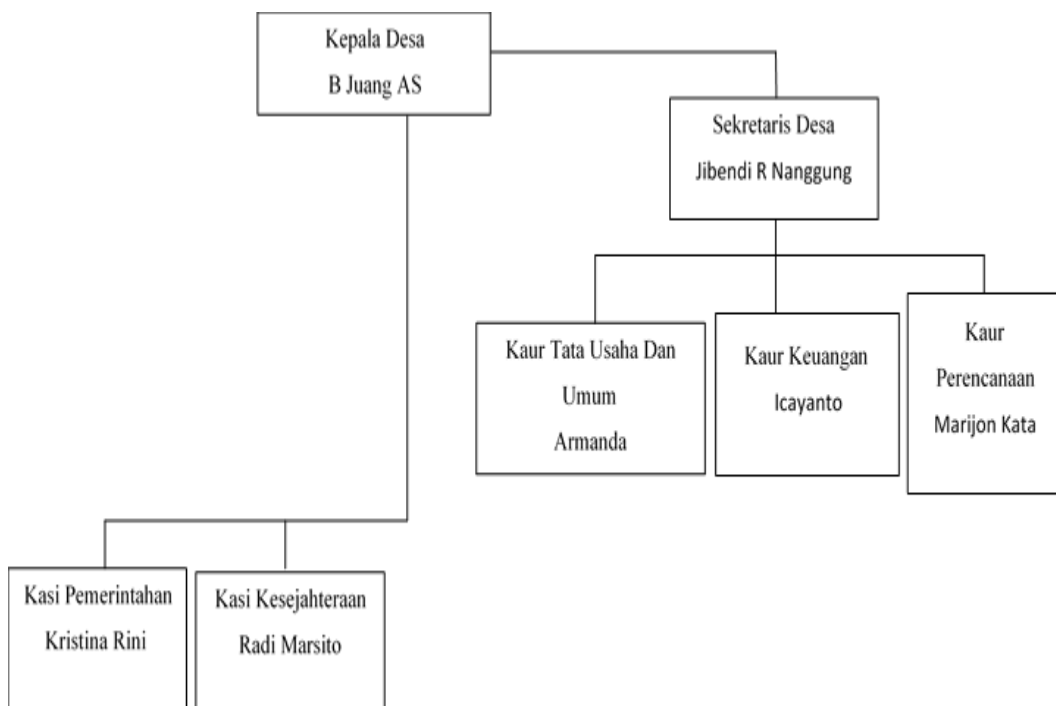
- 4) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

- 1) Kepala Seksi merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Seksi terdiri dari 2 KASI yaitu KASI Pemerintahan dan KASI peayanan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi kalurahan, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya, perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
- 3) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana peDesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olahraga dan karang taruna.

- 4) Kepala Seksi Pelayanan, Kasi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motifasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintah Desa Riam Batang



Sumber: RPJMDes Desa Riam Batang

2. Badan Permusyawaratan Desa Riam Batang

Anggota BPD merupakan perwakilan masyarakat Desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, baik melalui pemilihan langsung maupun musyawarah perwakilan (Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD). Masa jabatan anggota BPD berlangsung

selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Setiap Desa wajib memiliki BPD, yang berperan dalam menjalankan tugas dan fungsi penting dalam pemerintahan Desa. Jumlah anggota BPD ditetapkan dalam jumlah ganjil, dengan minimal lima orang dan maksimal sembilan orang. Penentuan jumlah anggota BPD mempertimbangkan jumlah penduduk serta kapasitas keuangan Desa, dengan wilayah cakupan berada dalam Desa tersebut.

Dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas BPD:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

b. Fungsi BPD:

- 1) Menggali aspirasi masyarakat;
- 2) Menampung aspirasi masyarakat;
- 3) Mengelola aspirasi masyarakat;
- 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 5) Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD memiliki beberapa hak khusus yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 pada Bab IV tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD pasal 51, sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- 2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa , pelaksanaan Pembangunan Desa , pembinaan kemasyarakatan Dsea, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 3) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan bela

BAB III

**ANALISIS PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA
DALAM IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI
DESA RIAM BATANG KECAMATAN SERUYAN HULU KABUPATEN
SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan analisis data berdasarkan data hasil wawancara dengan narasumber di lapangan. Hal ini bertujuan agar mempermudah peneliti untuk mendapat gambaran terkait pengembangan kapasitas pemerintah Desa dalam implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang. analisis yang digunakan oleh peneliti berpedoman pada ruang lingkup penelitian penelitian ini. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengembangan kapasitas SDM melalui rekrutmen, pelatihan, penggajian, dan kondisi lingkungan kerja
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa dilihat melalui faktor komunikasi, sumberdaya manusia, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi
3. Bagaimana sistem pelaporan keuangan yang telah dilakukan.

**A. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa di
Desa Riam Batang**

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pengembangan kapasitas memfokuskan pada 3 dimensi yaitu pengembangan sumber daya manusia (*development of human resource*), memperkuat organisasi (*strengthening*

organization), dan reformasi institusi (*reformation of institution*).

Berdasarkan hal di atas salah satu dimensi pengembangan kapasitas yaitu pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu institusi. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan agar tujuan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan yaitu melalui proses rekrutmen yang baik agar mendapatkan sumberdaya yang berkualitas, pelatihan yang tepat, sistem penggajian yang baik, dan kondisi lingkungan kerja yang baik.

1. Rekrutmen

Hal yang paling pertama dilakukan oleh suatu organisasi atau institusi dalam menempatkan seseorang di posisi tertentu dalam organisasi atau institusi adalah dengan melakukan proses rekrutmen. Rekrutmen berarti usaha untuk mendapatkan orang orang yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. rekrutmen ini dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang terampil.

Pemilihan ataupun rekrutmen Perangkat Desa di Desa Riam Batang tidak dilakukan dengan cara seleksi terbuka. Namun, selama ini yang terjadi Kepala Desa memilih secara langsung dengan berbagai pertimbangan. Walaupun dipilih secara langsung oleh Kepala Desa namun calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang ada pada PERDA Kabupaten Seruyan tentang

pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditambah dengan beberapa kriteria dari Kepala Desa terkait calon Perangkat Desa beberapa persyaratan seperti minimal tamatan SMA, dapat mengoperasikan alat komunikasi modern (komputer, laptop, dan lain sebagainya) dan loyalitas terhadap pekerjaan. Kemudian jika sudah dinyatakan lolos, calon perangkat Desa diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa. Untuk mengetahui bagaimana sistem rekrutmen Perangkat Desa di Desa Riam Batang Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Riam Batang:

“Perekrutan Perangkat Desa di Desa Riam Batang dipilih langsung sama Kepala Desa dengan mengacu pada PERDA Kabupaten Seruyan disitu terdapat kriteria dari calon Perangkat Desa ditambah beberapa kriteria dari Kepala Desa lagi”.

Terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa, dikuatkan dengan pernyataan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

“Pemilihan Perangkat Desa di Desa Riam Batang memang berbeda dengan Desa di provinsi lain seperti melakukan pemilihan Perangkat Desa dengan cara seleksi terbuka mulai dari menyebarluaskan informasi lowongan, pendaftaran, seleksi dan pengumuman seleksi. Perangkat Desa di Riam Batang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa, hal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Perangkat Desa dapat dipilih atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga pelaksanaan pemilihan di Desa Riam Batang selama ini tidak melanggar aturan bahkan sesuai. Selanjutnya, proses pemilihan tidak asal dilakukan namun tetap ada tahapan yang harus dilewati. Kepala Desa harus mengajukan nama-nama calon Perangkat Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, satu lowongan jabatan sebanyak-banyaknya 3 nama usulan. Setelah BPD menyetujui, calon terpilih akan ditetapkan dengan SK Kepala Desa”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber tersebut dapat diketahui bahwa proses rekrutmen Perangkat Desa yang terjadi di Desa Riam Batang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa dengan melihat berbagai kriteria yang ada seperti minimal tamatan SMA, mau melayani masyarakat dan dapat mengoperasikan komputer. Selain itu pengangkatan Perangkat Desa mengacu pada PERDA Kabupaten Seruyan Nomor 28 tahun 2006 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa yang mana Perangkat Desa dapat dipilih dan diangkat langsung oleh Kepala Desa tanpa pemilihan dengan Kepala Desa mengajukan nama Perangkat Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

Melanjutkan jawaban tersebut di atas peneliti bertanya terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam proses rekrutmen Perangkat Desa.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Riam Batang:

“Pemilihan Perangkat Desa ditunjuk langsung oleh Kepala Desa walaupun demikian, masih ada kendala yang ditemui, yakni Sumber Daya Manusia yang masih kurang. masyarakat Riam Batang pendidikannya kebanyakan Sekolah Dasar sehingga dalam perekrutannya masih kurang memenuhi persyaratan. Selain itu masyarakat rata-rata belum dapat menggunakan teknologi informasi seperti laptop dan komputer, padahal saat ini pelayanan Pemerintahan semakin maju dan efisien dengan cara dituntut menggunakan digitalisasi. Bahkan saat ini yang sudah menjadi Perangkat Desa pun masih ada yang belum bisa menggunakan komputer”.

Pernyataan di atas didukung oleh anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Riam Batang yang mengatakan bahwa:

“untuk kendala yang saya lihat dalam merekrut Perangkat Desa, banyak dari masyarakat yang hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) hal ini menjadi kendala juga mengingat kriteria untuk menjadi Perangkat Desa di Desa Riam Batang harus setidaknya tamat SMA dan juga banyak dari masyarakat masih belum bisa menggunakan komputer atau laptop padahal saat ini semuanya serba digital sehingga dalam proses rekrutmen Perangkat Desa sedikit terkendala”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa dalam perekrutan Perangkat Desa Riam Batang terdapat kendala kendala yang dialami seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada serta keterbatasan dalam menggunakan perangkat teknologi seperti komputer yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi Perangkat Desa. Dengan adanya kendala kendala tersebut membuat perekrutan Perangkat Desa di Desa Riam Batang kurang maksimal sehingga Perangkat Desa yang dipilih ada yang tidak sesuai dengan kriteria kriteria yang ada.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ana masyarakat Desa Riam Batang terkait dengan informasi lowongan pekerjaan menjadi Perangkat Desa sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya di Desa Riam Batang belum pernah ada penyebaran informasi lowongan pekerjaan di kantor Desa. sehingga masyarakat umum tidak dapat mendapatkan informasi terkait perekrutan. Hak dan kewenangan sepenuhnya ada di tangan Kepala Desa. Kepala Desa dapat menunjuk siapapun yang dirasa mampu mengisi jabatan yang ada. Setiap pergantian Kepala Desa peluang pergantian Perangkat Desa juga besar”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang profesional untuk sebuah institusi, proses rekrutmen sangat penting untuk

dilakukan. Hal ini karena dalam proses rekrutmen kita dapat memilih sumberdaya sumberdaya yang memenuhi kriteria kriteria yang telah ditetapkan dengan begitu sumberdaya yang dipilih dapat mengisi jabatan jabatan yang ditentukan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Meskipun begitu dalam proses rerutmen juga terdapat kendala kendala yang dialami selama proses rekrutmen hal ini mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia yang direkrut. Dalam proses rekrutmen di Desa Riam Batang pemilihan Perangkat Desa ditunjuk dan diangkat langsung oleh Kepala Desa dengan mengajukan nama nama kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk mendapat persetujuan dan setelah mendapatkan persetujuan, Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa dengan SK Kepala Desa. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ini mengacu pada PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Seruyan Nomor 28 tahun 2006 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Perekrutan Perangkat Desa di Desa Riam Batang memiliki kendala mengingat SDM yang dimiliki banyak yang masih belum bisa mengoperasikan komputer dan laptop serta banyak dari masyaakat yang hanya lulusan SD sehingga Kepala Desa memilih anggota yang tersedia saja di masyarakat tetapi juga mempertimbangkan beberapa aspek seperti dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya.

2. Pelatihan

Perangkat Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan visi misi Pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan perangkat Desa yang profesional yang mampu bekerja sesuai dengan bidang jabatannya sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan baik. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang profesional diperlukan proses rekrutmen yang baik dan pelatihan. Pelatihan perangkat Desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas para aparat Desa dalam menjalankan tugas tugasnya. Pelatihan perangkat Desa menjadi landasan yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola Desa yang baik dan dapat menjadi penggerak kemajuan di Desa Riam Batang.

Pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Riam Batang salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan. Dalam rangka pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa Pemerintah Desa Riam Batang Pernah beberapa kali mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh DPMD. Untuk mengetahui bagaimana pelatihan dalam rangka pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang berikut hasil wawancara peneliti.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Riam Batang tentang adanya pelatihan yang diikuti oleh Pemerintah Desa Riam Batang sebagai berikut:

“Pelatihan tentang penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini memang ada, biasanya pelatihan diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Seruyan. yang ikut pelatihan selama ini hanya Bendahara dan Kepala Desa saja”.

Melanjutkan jawaban dari Kepala Desa tersebut peneliti bertanya terkait apakah semua perangkat Desa bisa mengoperasikan aplikasi SISKEUDES berikut jawaban dari Kepala Desa Riam Batang:

“Untuk yang bisa mengoperasikan aplikasi SISKEUDES ini mungkin hanya saya sendiri yang bisa sepenuhnya mengoperasikannya walaupun bendahara pernah ikut pelatihan tapi masih belum sepenuhnya bisa mengoperasikannya. Sedangkan perangkat Desa yang lain ada sebagian yang belum bisa mengoperasikan laptop dan komputer dan yang lain hanya sekedar bisa saja tidak yang menguasai”.

Hal yang sama disampaikan oleh Bendahara Desa Riam Batang terkait apakah pernah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SISKEUDES. Berikut jawabannya:

“Betul memang pernah ada diadakan pelatihan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini saya sendiri juga pernah ikut dalam pelatihan, saat itu diselenggarakan oleh DPMD di Kuala Pembuang”.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh anggota BPD Desa Riam Batang sebagai berikut:

“Ya ada, saya sendiri beberapa kali mengetahui dari bincang bincang dengan beberapa Perangkat Desa bahwa Bendahara dan Kepala Desa pergi untuk mengikuti pelatihan”.

Melanjutkan jawaban dari Bendahara Desa Riam Batang tersebut peneliti bertanya terkait materi apa saja yang diberikan pada saat pelatihan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Berikut jawabannya:

“Seingat saya kami diberitahukan fitur apa saja yang ada di aplikasi SISKEUDES, apa saja kegunaannya lalu pemaparan peraturan perundang undangan terkait pengelolaan keuangan Desa, saat itu ada juga ditunjukkan simulasi penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa, ada juga sesi tanya jawab jadi kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan langsung kepada mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas menunjukkan bahwa Perangkat Desa khususnya Kepala Desa dan Bendahara Desa pernah mengikuti pelatihan terkait penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Dalam pelatihan tersebut peserta dikenalkan dengan fitur-fitur dari aplikasi SISKEUDES serta cara penggunaannya, hal ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan dan menambah skill dalam pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang. Akan tetapi tidak semua perangkat Desa bisa mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa hanya Kepala Desa saja yang mampu mengoperasikan aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang.

Melanjutkan jawaban tersebut di atas peneliti bertanya terkait kendala yang dialami selama pelatihan. Berikut jawaban dari Kepala Desa Riam Batang:

“Untuk kendalanya sendiri selama pelatihan tidak ada tetapi kendalanya lebih kepada pemerintah Desa terlambat dapat info terkait adanya pelatihan ini karena sulitnya akses informasi seperti jaringan internet di Desa adapun tower yang ada terkadang tidak bisa digunakan. Akses ke kabupaten juga sangat jauh sehingga terkadang tidak ikut dalam pelatihan yang diadakan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tidak ada kendala terkait proses pelatihan penggunaan aplikasi SISKEUDES hanya saja pemerintah Desa terkadang tidak mendapatkan informasi terkait diadakannya pelatihan penggunaan SISKEUDES serta akses ke kabupaten yang sangat jauh sehingga terkadang pemerintah Desa tidak dapat mengikuti pelatihan yang diadakan.

Peneliti juga menanyakan terkait apa hasil yang didapat setelah mengikuti pelatihan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa berikut jawaban dari Kepala Desa Riam Batang:

“Hasil yang saya dapatkan dari pelatihan yang pernah diikuti salah satunya menjadi lebih paham ya sama fitur fitur di dalam aplikasi SISKEUDES apa saja kegunaannya sehingga dalam penggunaannya lebih memudahkan untuk mengelola keuangan Desa sampai tahap pelaporan jadi setiap kegiatan kita sesuai sama peraturan yang ada”.

Senada dengan pernyataan di atas Bendahara Desa Riam Batang mengatakan sebagai berikut:

“Ya untuk hasil yang didapat menjadi lebih paham cara menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini selain itu skil kita juga lumayan bisa ditingkatkan walaupun masih belum bisa sepenuhnya menguasai menggunakan aplikasi ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan memberikan dampak yang baik bagi peserta pelatihan seperti pemahaman terkait fungsi fitur fitur yang ada di dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diikuti dalam rangka pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang memberikan dampak yang cukup baik akan tetapi pelatihan yang dilaksanakan hanya diikuti oleh kepala Desa dan bendahara saja sehingga dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa hanya sedikit dari perangkat Desa yang bisa mengoperasikannya. Pelatihan dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia sangat penting hal ini karena dalam pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi perangkat

Desa baik aspek teknis maupun aspek manajerial. Dengan memahami dan menguasai Aplikasi Sistem Keuangan Desa perangkat Desa dapat menyusun laporan keuangan Desa sesuai dengan aturan dalam pengelolaan keuangan Desa sehingga pengelolaan dana Desa dapat efektif dan efisien. Dengan adanya pelatihan ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi perangkat Desa dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

3. Penggajian

Selain rekrutmen dan pelatihan sistem penggajian yang jelas juga salah satu unsur dalam mengembangkan sumber daya manusia. Sistem penggajian perangkat Desa merupakan salah satu aspek peting dalam manajemen pemerintahan Desa yang berfungsi untuk memastikan kesejahteraan perangkat Desa, meningkatkan motivasi kerja, dan mendukung kinerja pemerinthan yang lebih baik. Pentingnya sistem penggajian yang adil dan tepat waktu tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perangkat Desa tetapi juga meningkatkan motivasi kerja perangkat Desa.

Sistem penggajian perangkat Desa di Desa Riam Batang akan diberikan setiap tiga bulan hal ini telah disepakati bersama melalui musyawarah. Untuk mengetahui bagaimana sistem penggajian perangkat Desa di Desa Riam Batang, berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Riam Batang:

“Pemberian gaji di Desa Riam Batang untuk besaran gajinya sudah mengacu pada peraturan yang tertuang dalam peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan, kita berikan setiap 3 bulan sekali hal

ini sudah kita diskusikan bersama dengan perangkat Desa kesepakatan ini diambil untuk efisiensi pengelolaan anggaran dan kestabilan keuangan Desa di samping itu juga pencairan dana untuk Desa kita terdapat tiga tahap dan nantinya gaji gaji perangkat akan dibayar setelah pencairan dana dan hingga saat ini pembayaran 3 bulan sekali selalu lancar”.

Hal senada juga disampaikan oleh Bendahara Desa Riam Batang mengatakan bahwa:

“Sistem penggajian untuk Perangkat Desa Riam Batang kita sudah diskusikan bersama sama dan mencapai kesepakatan bahwa untuk gaji kita berikan setiap tiga bulan sekali sejauh ini tidak ada keluhan dari perangkat Desa terkait pemberian gaji ini”.

Hal senada juga disampaikan oleh Kaur Perencanaan Desa Riam Batang mengatakan bahwa:

“Selama ini besaran gaji yang kita dapatkan sudah sesuai ya dan pernah diadakan rapat terkait penyaluran gaji kepada perangkat Desa saat itu kita capai kesepakatan bahwa gaji akan disalurkan dalam 3 bulan sekali saat pencairan akan langsung diberikan jadi saat kita terima gaji jumlahnya juga kelihatan banyak sejauh ini belum ada keterlambatan pemberian gaji kepada perangkat Desa”.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem penggajian perangkat Desa di Desa Riam Batang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali setiap setelah pencairan yang mana pencairan dana dilakukan dalam 3 tahap hal ini sudah disepakati bersama. Pemberian gaji kepada perangkat Desa sudah mengikuti peraturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan. Dengan adanya sistem penggajian yang jelas dan diberikan dengan lancar hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja perangkat Desa sehingga dapat menimbulkan dampak positif bagi pelayanan kepada masyarakat.

4. Kondisi Lingkungan Kerja

Penyediaan kondisi lingkungan kerja yang baik merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam upaya pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas. Kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan dapat menjaga kesehatan fisik dan mental perangkat Desa. Dengan begitu komitmen suatu organisasi dalam menyediakan kondisi kerja yang baik dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang optimal. Dalam pengembangan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan, hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja perangkat Desa.

Desa Riam Batang telah menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang terselenggaranya pemerintahan Desa seperti menyediakan gedung kantor dan beberapa sarana penunjang lainnya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kerja di kantor Desa Riam Batang berikut wawancara peneliti bersama beberapa narasumber di Desa Riam Batang.

Berikut hasil wawancara peneliti bersama Kepala Desa terkait kondisi lingkungan kerja kantor Desa Riam Batang:

“Untuk Desa kita, kita memiliki satu gedung kantor Desa dan satu gedung pertemuan yang mana setiap gedung sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan yang ada juga disediakan beberapa ruangan salah satunya ruang untuk pelayanan dan ruang kepala Desa”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bendahara Desa Riam Batang sebagai berikut:

“Desa Riam Batang sudah memiliki satu gedung kantor yang menurut saya sarana dan prasarannya sudah lengkap ya mulai dari

kursi sama meja untuk perangkat Desa, laptop, komputer, printer semua ada kalau untuk keperluan kantor setiap tahun kita ada angarkan dana untuk keperluan kantor kita sehingga kita bekerja juga nyaman tidak yang kekurangan”.

Senada dengan pernyataan di atas berikut hasil wawancara dengan

Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Riam Batang:

“Untuk sarana dan prasarana di Desa kita sudah sangat memadai ada yang sudah diberikan laptop untuk menunjang kinerjanya sehingga tidak ada alasan kalau ada yang mengeluh kekurangan sarana penunjang kegiatan di kantor Desa dengan disediakan sarana dan prasarana ini dapat memudahkan kita juga sebagai perangkat Desa jadi kalau ada perlu apa apa misalnya untuk ngeprint kita sudah punya printer”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa kondisi lingkungan kerja dalam hal sarana dan prasarana di kantor Desa Riam Batang sudah sangat baik hal ini dibuktikan dengan dilengkapinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan di kantor Desa Riam Batang.

Melanjutkan jawaban tersebut peneliti bertanya kepada Kepala Desa terkait jadwal masuk kantor dan peraturan jam kerja di kantor Desa Riam Batang sebagai berikut:

“Untuk jadwal masuk kantor kita ada setiap hari senin sampai jumat untuk hari sabtu dan minggu libur akan tetapi kalau ada masyarakat yang ingin mengurus sesuatu dapat mendatangi rumah perangkat Desa yang bersangkutan. kalau untuk jam masuk kantor kita masuk setiap jam 08;00 sampai dengan jam 12;00 setelah itu langsung pulang”.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bendahara Desa Riam Batang sebagai berikut:

“Betul kita ada jadwal masuk kantor setiap hari senin sampai jumat

saja kalau ada yang mau ngurus sesuatu bisa langsung datang ke rumah Kades. Kalau di kampung kita ni lebih sering kalau ada urusan datang pas malam sehabis masyarakat kerja balik dari ladang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa kantor Desa Riam Batang memiliki jam kerja yang sudah jelas dan terjadwal sehingga perangkat Desa dapat mengikuti jadwal kantor yang sudah jelas.

Melanjutkan jawaban tersebut peneliti bertanya apakah semua perangkat Desa disiplin dalam mengikuti jam kantor. Berikut wawancara dengan Kepala Desa Riam Batang:

“Kalau untuk dikatakan disiplin masih belum juga kadang ada yang tidak masuk kantor ada juga yang terlambat tapi tidak yang setiap hari jarang kalau tidak masuk kantor”.

Adapun saat peneliti menanyakan terkait kondisi hubungan antar Perangkat Desa sebagai berikut:

“untuk hubungan antar sesama Perangkat Desa disini sudah sangat baik ya mengingat di Desa kita sendiri hampir semuanya keluarga begitu juga orang-orang yang mengisi jabatan Perangkat Desa ini hampir semuanya keluarga dekat sehingga hubungan antar sesama masih sangat baik sejauh ini tidak ada pertikaian yang terjadi antar sesama sehingga suasana di kantor juga nyaman.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan di atas dapat diketahui kondisi hubungan antar sesama perangkat Desa masih sangat baik hal ini dikarenakan antar perangkat Desa masih memiliki hubungan kekeluargaan yang membuat hubungan antar sesama masih terjalin sangat baik.

Berdasarkan jawaban dari kepala desa peneliti menanyakan

bagaimana kondisi hubungan antar perangkat desa kepada Bendahara Desa

Riam Batang sebagai berikut

“selama ini hubungan antar sesama perangkat desa setau saya tidak pernah terjadi konflik baik baik saja dan malahan sangat dekat satu sama lain karena pada dasarnya satu kampung keluarga semua sampai ke perangkat desa juga masih punya hubungan keluarga”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa riam batang tersebut menguatkan pernyataan dari kepala desa bahwa hubungan antar sesama perangkat desa di desa riam batang masih sangat baik .

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa di Desa Riam Batang sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sudah dilengkapi dengan baik serta hubungan antar sesama perangkat Desa terjalin harmonis hal ini dapat menjadi pondasi yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

Berikut tabel sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Riam Batang:

Tabel 3. 1 Sarana dan Prasarana Desa Riam Batang

No	Inventaris	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Komputer	3	Baik
	Laptop	4	Baik
2	Printer	3	Baik
3	Kendaraan Dinas	1	Baik
4	Genset	1	Baik
5	Pengeras Suara	1	Baik
6	Meja	11	Baik
7	Kursi	20	Baik
8	Almari Arsip kayu	1	Baik

Sumber: RPJMDes Desa Riam Batang

B. Pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang

1. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan terdapat factor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasiannya. Dalam pembahasan penelitian ini peneliti menggunakan indikator-indikator berdasarkan teori Edward III dalam menjelaskan faktor faktor keberhasilan dalam pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang. Indikator tersebut meliputi faktor komunikasi, sumber daya manusia, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Tanpa adanya komunikasi yang baik kebijakan yang diimplementasikan akan menjadi tidak maksimal. Perangkat Desa yang belum familiar dengan teknologi teknologi baru dapat menjadi suatu kendala dalam pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Oleh karena itu dalam pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa perlu bagi pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan agar para penyelenggara kebijakan dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan maksimal. Selain itu dalam proses penyelenggaraannya terdapat perubahan peraturan peraturan dalam

penggunaan dana Desa sehingga komunikasi antara pemerintah Desa dan pemerintah daerah harus terjalin agar dalam penggunaan anggaran dana Desa sesuai dengan aturan yang ditentukan. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antara pemerintah Desa dengan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran dan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Berikut wawancara bersama Kepala Desa Riam Batang:

“Kalau untuk perubahan aturan itu biasanya kita dapat info dari whatsapp grup jadi kita punya whatsapp grup kepala-kepala Desa untuk komunikasi nah kalau ada informasi informasi terkait perubahan perubahan aturan seperti itu biasanya ada disampaikan digrup whatsapp. Untuk sampai kekita atau tidak infonya ya tergantung signal di Desa kadang kalau jaringannya sedang rusak ya kita jadi terlambat dapat info. Misalnya dulu saat covid kan itu tiba tiba terjadi perubahan penggunaan dana Desa yang dialokasikan ke penanggulangan covid jadi data data yang kita sudah msaukkan ke siskeudees kita revisi lagi kalau infonya cepat kan kita tidak harus revisi revisi lagi”

Melanjutkan jawaban di atas peneliti bertanya terkait bagaimana jika ada kendala dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan deesa. Berikut jawaban dari kepaal Desa Riam Batang:

“Kalau misalnya ada terjadi error atau ada masalah di aplikasi sistem keuangan Desa biasanya kita ada komunikasi dengn orang orang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mereka selama ini selalu siap bantu kalau ada terjadi error”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan penyampaian informasi atau komunikasi yang ada sudah cukup baik akan tetapi informsi yang disampaikan sedikit terhambat hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jaringan internet di Desa Riam Batang sehingga

informasi informasi yang ada terlamat untuk diketahui oleh aparaturnya Desa.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi hal yang sangat krusial dalam pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Tanpa adanya sumber daya yang memadai penerapan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam hal ini sumberdaya tidak hanya sebatas sumber daya manusia saja akan tetapi mencakup fasilitas untuk menunjang kegiatan kegiatan untuk mendukung terselenggaranya penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan maksimal dan dijalankan dengan apa yang diharapkan. Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa membutuhkan penguasaan dan keterampilan dalam penggunaan komputer dan penguasaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa itu sendiri.

Sumberdaya yang dimiliki oleh Desa Riam Batang secara kuantitas dapat menjadi kekuatan dalam pengembangan Desa akan tetapi kuantitas yang dimiliki ini tidak diimbangi dengan kualitas yang dimiliki. Dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa diperlukan keahlian dan penguasaan dalam pengoperasian komputer. Di Desa Riam Batang pengoperasian aplikasi sistem keuangan Desa dikerjakan oleh Kepala Desa Riam Batang hal ini dikarenakan banyak dari perangkat Desa yang belum bisa mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Untuk mengetahui bagaimana sumberdaya yang

dimiliki dalam pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang. Berikut wawancara dengan Kepala Desa Riam Batang:

“Untuk operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa kita saya sendiri yang mengoperasikannya karena di Desa kita ini sedikit sekali yang paham cara pengoperasian aplikasi ini ditambah lagi kurangnya dari perangkat Desa sampai masyarakat yang bisa mengoperasikan komputer kadang kewalahan juga meskipun terkadang dibantu sama bendahara Desa tapi masih tidak cukup juga jadi proses pengerjaannya agak lebih lama”.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui yang menjadi kendala dalam pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang karena keterbatasan sumber daya manusia yang bisa mengoperasikan komputer dan aplikasi sistem keuangan Desa sehingga Kepala Desa Riam Batang sendiri yang mengoperasikannya.

Melanjutkan jawaban tersebut peneliti bertanya terkait ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang:

“Untuk fasilitasnya sendiri di Desa kita sudah sangat mendukung sekali ya mulai dari disediakan laptop dan komputer dan keperluan keperluan lain cuma kalau membutuhkan akses internet kita agak kesulitan harus ke Desa tetangga yang internetnya lebih lancar walaupun sudah ada tower telkomsel di Desa kita tapi masih belum beroperasi dengan maksimal kadang tidak bisa digunakan sehingga sedikit menyulitkan juga”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas untuk menunjang terselenggaranya penggunaan aplikasi SISKEUDES sudah cukup baik hanya saja terdapat kendala jika

membutuhkan akses internet dalam pengoperasiannya yang mana di Desa Riam Batang akses internet masih belum memadai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sumberdaya manusia yang ada di Desa Riam Batang masih belum memadai untuk mendukung terselenggaranya penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa hal ini dikarenakan sedikit dari masyarakat dan aparatur Desa yang dapat mengoperasikan laptop dan komputer akan tetapi dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah sangat memadai sehingga dalam pengimplementasiannya sedikit lebih terbantu.

c. Sikap

Sikap adalah salah satu faktor penentu dalam pengimplementasian suatu kebijakan sikap positif dan negatif dari berbagai pihak dapat mempengaruhi pengimplementasian kebijakan tersebut. Pada penelitian ini peneliti melihat bagaimana aparatur Desa menanggapi terkait kebijakan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang. untuk mengetahui bagaimana sikap dari pemerintah Desa dengan diterapkannya Aplikasi Sistem Keuangan Desa berikut wawancara dengan Kepala Desa Riam Batang:

“Untuk penggunaan aplikasi SISKEUDEDES ini saya sendiri sangat mendukung sekali karena di aplikasi ini setiap bidang kegiatan ada kamar kamarnya sendiri jadi lebih memudahkanlah buat kita memasukkan data data kita”.

Pernyataan tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Bendahara Desa Riam Batang berikut wawancara dengan Bendahara Desa Riam Batang:

“Kalau untuk menerima ya kita sangat menerima karena yang saya lihat aplikasi ini memudahkan kita juga untuk mengelola keuangan Desa bikin perencanaan segala apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aparatur Desa sangat mendukung dengan diberlakukannya penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang hal ini dianggap lebih memudahkan dalam hal pengelolaan keuangan Desa.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang jelas dan penempatan posisi yang sesuai dengan kapasitas individu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi penentu keberhasilan dalam pengimplementasian suatu kebijakan. penempatan posisi yang sesuai dengan keahliannya dapat meningkatkan motivasi semangat kerja karena tugas yang diberikan sesuai dengan apa yang menjadi keahlian mereka. Pengoperasian aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang hanya dioperasikan oleh Kepala Desa Riam Batang.

Di Desa Riam Batang masih terdapat perangkat Desa yang belum sesuai dengan kriteria yang ada hal ini karena keterbatasan sumberdaya yang dimiliki sehingga pemerintah Desa mengambil apa yang tersedia saja. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa

Riam Batang terkait dengan penempatan posisi jabatan aparatur Desa:

“Untuk penempatan aparatur di Desa kita memang masih ada yang belum sesuai dengan kriteria dan kapasitasnya ini karena keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan ahli sehingga terkadang kita mengambil aparatur yang ada saja tetapi juga mempertimbangkan aspek lain seperti dapat bertanggungjawab dengan tugasnya”.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan sumberdaya yang kompeten menjadi tantangan dalam penempatan penempatan posisi jabatan yang ada di dalam pemerintah Desa sehingga kepala Desa terpaksa untuk mengangkat aparatur berdasarkan ketersediaannya di Desa bukan pada kompetensinya. Dalam pengimplementasian aplikasi SISKEUDES pengoperasiannya dilakukan oleh kepala Desa.

2. Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa yang baik menjadi salah satu unsur yang penting dalam pembangunan Desa oleh karena itu Desa harus memastikan dana yang diterima dikelola dengan bijak, transparan dan akuntabel. Aplikasi Sistem Keuangan Desa hadir sebagai solusi untuk mendukung tata kelola keuangan Desa yang lebih efisien. Adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini bertujuan untuk membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Selain itu adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat menjadi langkah strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran di Desa.

Desa Riam Batang merupakan salah satu Desa yang sudah menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Riam Batang.

“Desa Riam Batang sudah menerapkan penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa penggunaan aplikasi ini masih diterapkan hingga saat ini”.

Dalam hal ini peneliti akan meneliti bagaimana penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang, bagaimana proses pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada proses pelaporan keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES.

a. Tahap Perencanaan

Dalam pengelolaan keuangan Desa tahap yang paling pertama dilakukan adalah tahap perencanaan. Perencanaan yang matang dapat memastikan program dan penggunaan anggaran dapat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Dengan perencanaan yang partisipatif dan transparan dan berbasis prioritas Desa dapat menggunakan anggaran dengan optimal. Pada tahap ini dokumen yang dihasilkan dari musrenbangdes adalah RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. sebelum menginput data perencanaan kedalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa pemerintah Desa melakukan Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang melibatkan seluruh masyarakat Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan

pemangku kepentingan lainnya hal ini bertujuan untuk merumuskan kebutuhan kebutuhan serta penggunaan anggaran Desa sealam satu tahun kedepan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Riam Batang:

“Jadi untuk tahap perencanaan ini diawali dengan diadakannya musrenbangdes kita undang semua baik dari unsur masyarakat, BPD serta pemangku kepentingan yang ada di Desa kita. Setiap aspirasi yang disampaikan kita bahas agar nanti dapat ditentukan apa prioritas pembangunan yang dibutuhkan masyarakat”.

Hal ini didukung oleh pernyataan anggota BPD Desa Riam Batang sebagai berikut:

“Setiap tahun kita adakan musrenbangdes ini untuk membahas apa saja kegiatan yang akan dilaksanakan apa saja yang menjadi prioritas pembangunan di Desa nanti diundang masyarakat, BPD juga diundang untuk sama sma membahas perencanaan program kerja pemerintah Desa”.

Melanjutkan jawaban dari Kepala Desa Riam Batang peneliti bertanya terkait kegunaan aplikais sistem keuangan Desa pada bagian perencanaan. Berikut jawaban dari Kepala Desa Riam Batang:

“Pada tahap ini pada bagian perencanaan pada aplikasi SISKEUDES digunakan untuk mengisi data RPJMDes dan RKPDes serta data umum tentang Pemerintah Desa seperti nama Kepala Desa, NPWP Desa selain itu juga mengisi visi, misi, tujuan dan sasaran Desa”.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sebelum data diinput ke dalam perencanaan pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa, pemerintah Desa terlebih dahulu melaksanakan Musrenbangdes untuk menyepakati kegiatan apa yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Pada proses perencanaan, penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa harus mengisi data umum Desa dan perencanaan Desa yang meliputi, visi dan misi, serta RPJMDes yang di dalamnya mencakup RKPDes. RKPDes merupakan penjabaran rencana tahunan dari RPJMDes.

b. Tahap Penganggaran

Setelah penetapan dan penginputan data Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada tahap perencanaan, selanjutnya dilakukan tahap penganggaran atau penyusunan anggaran untuk waktu satu tahun. pada tahap ini akan menginput data Rencana Penggunaan Anggaran (RAB) sampai pada pengisian APBDDes. hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Riam Batang:

“Setelah dilakukan pengisian data data pada tahap perencanaan dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa pada tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah menyusun rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang telah ditetapkan”.

Melanjutkan jawaban dari Kepala Desa Riam Batang tersebut peneliti bertanya terkait kegunaan aplikais sistem keuangan Desa pada bagian perencanaan. Berikut jawaban dari Kepala Desa Riam Batang:

“Pada bagian penganggaran Aplikasi Sistem Keuangan Desa digunakan untuk mengisi data data pada bidang penganggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan setelah diisi semuanya maka dapat mencetak RAB untuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah APBDDes diisi semua selanjutnya mengusul perdes APBDDes dengan memposting”.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa setelah RKPDes ditetapkan tahap selanjutnya adalah proses

penyusunan APBDes pada tahap penganggaran. Pada tahap ini operator SISKEUDES akan memasukkan data sesuai dengan apa yang akan dianggarkan berdasarkan RKPDes yang telah disetujui.

c. Tahap Penatausahaan

Dalam pengelolaan keuangan Desa proses penatausahaan dilakukan oleh bendahara Desa. Pada tahap ini bendahara Desa melakukan pencatatan pada setiap transaksi yang ada seperti penerimaan dan pengeluaran Desa berdasarkan dokumen yang sah seperti bukti kwitansi hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bendahara Desa Riam Batang sebagai berikut:

“Setelah selesai mengisi data pada tahap penganggaran dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa selanjutnya adalah memasukkan data penatausahaan pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa seperti memasukkan data anggaran yang sudah digunakan sesuai dengan bukti kwitansi pengeluaran”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dalam setiap transaksi baik berupa pemasukan dan pengeluaran dicatat oleh Bendahara Desa Riam Batang dan kemudian dimasukkan ke dalam kolom penatausahaan pada Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

d. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan proses penting untuk memberikan informasi mengenai penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Proses ini memastikan bahwa setiap

dana yang diterima dan dikeluarkan Desa tercatat dengan jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah semua tahapan mulai dari perencanaan hingga tahap akhir dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES semua data yang sudah dimasukkan kedalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah otomatis tersusun kedalam microsoft excel sehingga sangat memudahkan dalam pembuatan pelaporan. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat. Berikut wawancara peneliti dengan Kepala Desa Riam Batang:

“Setelah menyelesaikan semua kegiatan kepala Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban realisasi kegiatan selama satu tahun kepada Bupati melalui Camat”.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah melaksanakan setiap kegiatan yang telah dilakukan Kepala Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran laporan yang dihasilkan akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

C. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan uraian data pada pengembangan kapasitas sumberdaya manusia perangkat Desa dan implementasi aplikasi sistem keuangan Desa di Desa Riam Batang, dalam rangka pengimplementasi aplikasi sistem keuangan Desa diperlukan sumberdaya manusia yang profesional oleh karena itu

diperlukan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia agar pengimplementasiannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan diperlukan banyak faktor faktor untuk menunjang keberhasilan kebijakan tersebut seperti faktor komunikasi, sumberdaya, sikap, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Suatu kebijakan akan diimplementasikan dengan baik jika si pelaksana memahami dan menguasai apa yang diperintahkan. Oleh karena itu, dalam rangka pengimplementasian aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang, pemerintah Desa mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SISKEUDES yang diselenggarakan oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Keikutsertaan pemerintah desa dalam pelatihan ini sangat penting untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintah desa yang ada di Desa Riam Batang. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai aplikasi sistem keuangan desa, diharapkan para pelaksana kebijakan dapat mengelola dan mengimplementasikan aplikasi tersebut dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini bertujuan agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan optimal, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemampuan teknis dan manajerial para perangkat desa dalam mengelola sistem keuangan yang berbasis teknologi, sehingga proses administrasi

dan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Sumberdaya

Dalam pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa sumberdaya manusia menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi. Tanpa adanya sumberdaya yang terampil dan profesional pengimplementasian aplikasi SISKEUDES tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan.

Dalam upaya mengembangkan kapasitas pemerintah desa di Desa Riam Batang dalam pengimplementasian aplikasi Sistem Keuangan Desa, pemerintah desa berusaha untuk merekrut perangkat desa yang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjaring dari warga desa yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan perangkat komputer, khususnya laptop. Hal ini sangat penting agar pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam proses perekrutan perangkat desa ini, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk mendukung pengimplementasian aplikasi SISKEUDES secara efektif. Selain itu untuk menunjang pengimplementasian SISKEUDES serta dalam rangka pengembangan

kapasitas pemerintah desa, pemerintah desa juga telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pengimplementasian aplikasi SISKEUDES sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat kerjadan produktivitas pernagkat desa,

Dengan adanya upaya dari pemerintah desa dalam pengembangan kapasitas SDM dengan menyediakan sarana serta prasarana yang memadai, diharapkan pengimplementasian aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang dapat berjalan dengan optimal. selama ini pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa di Desa Riam batang hanya dioperasikan oleh kepala desa saja sehingga kurang efektif dan efisien dalam pengimplementasiannya.

3. Sikap

Faktor sikap memiliki peran yang sangat penting dalam pengimplementasian aplikasi SISKEUDES. Sikap positif dan proaktif dari semua pihak yang terlibat dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Dalam pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa di Riam Batang aparatur desa sangat terbuka dan menerima dengan diimplementasikannya Apliksai SISKEUDES di Desa Riam Batang.kondisi lingkungan kerja yang positif ini dapat memberi pengaruh yang baik dalam pengembangan kapasitas sumberdaya manusia perangkat desa dalam pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa. selain itu adanya sistem penggajian yang jelas dapat menentukan bagaimana sikap dari aparatur desa dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan dan menjalankan tugasnya. Di desa riam batang pemberian gaji kepada perangkat desa akan diberikan setiap tiga bulan hal ini telah dimusyawarahkan bersama. Sistem penggajian yang jelas dan adil dapat membawa dampak positif seperti meningkatnya motivasi kerja

4. Struktur birokrasi

Penempatan posisi sesuai dengan kapasitas individu Struktur birokrasi yang jelas dan efisien dapat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan pengimplementasian aplikasi SISKEUDEDES. rekrutmen yang baik serta menempatkan individu individu yang kompeten dan profesional pada keahliannya menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan. penempatan posisi perangkat desa di desa riam batang masih belum sesuai dengan keahliannya hal ini dikarenakan kurangnya SDM yang kompeten dan profesional sehingga kepala desa hanya memilih berdasarkan ketersediaan dan kriteria yang paling mendekati saja. Dalam rangka pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam implementasi aplikasi sistem keuangan desa mengikuti pelatihan dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa di desa Riam Batang yang telah dilakukan yaitu mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pengimplementasian aplikasi sistem keuangan desa.
2. pengimplementasian aplikasi siskeudes di desa riam batang masih kurang optimal Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi salah satu kendala dalam pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang. Dalam pengoperasian aplikasi SISKEUDES di Desa Riam Batang dikerjakan oleh Kepala Desa saja sehingga dalam proses pengerjaannya kurang efisien. Kurangnya sumberdaya yang kompeten dan profesional membuat ketidak sesuaian dalam penempatan penempatan pada posisi jabatan. Selain itu Terbukanya akan kehadiran pengembangan teknologi dan informasi dalam proses pemerintahan Desa menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Riam Batang. selain itu tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pengimplementasian aplikasi SISKEUDES di

Desa Riam Batang juga menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pengimplementasian aplikasi SISKEUDES.

3. Penerapan aplikasi siskeudes di Desa Riam Batang

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah sesuai dengan aturan dalam pengelolaan keuangan Desa dimulai dengan tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pada tahap pelaporan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelatihan dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa seharusnya tidak hanya diikuti oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa saja akan tetapi dipilih salah satu operator dari masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut sehingga setelah operator memahami dan menguasai pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa operator tersebut dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat Desa dan perangkat Desa sehingga dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Bagi Pemerintah Desa Riam Batang untuk melibatkan tenaga muda yang profesional dalam mendukung pengimplementasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
3. Bagi pemerintah Desa Riam Batang untuk lebih memaksimalkan potensi SDM yang ada di Desa Riam Batang dengan membuka seleksi berbasis kompetensi secara terbuka untuk ditempatkan di posisi yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, P., Mutiara, S. P., & Nasution, S. W. R. (2024). ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN PBL MENGGUNAKAN MEDIA ANIMASI DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PADA MATERI GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK KELAS XI SMA NEGERI 1 ANGKOLA SELATAN TA 2023/2024. *Jurnal Physics Education (PhysEdu)*, 6(3), 11-16.
- Astiwi, A. R. (2018). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Studi pada Biro Sumber Daya Manusia di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Buchari, A., Santoso, M. B., & Marlina, N. (2017). Pengembangan kapasitas kelembagaan Desa tangguh bencana di kabupaten garut (studi kasus di Desa pasawahan Kecamatan tarogong kaler). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 49-62.
- Dewantari, N. A., & Kurniawan, I. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen Sebagai Upaya Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1413-1432.
- Faâ, Y., Muchsin, S., & Abidin, A. Z. (2019). Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Respon Publik*, 13(4), 61-67.
- Fitriani, F., & Hayati, R. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Di Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur. *JAPB*, 4(2), 834-843.
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Hayati, R. (2021). Efektifitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 5(2), 99-110.
- Hendra, H. (2020). pengaruh budaya organisasi, pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 1-12.

- Hiryanto, H., Tohani, E., & Miftahuddin, M. (2020). Peningkatan Kapasitas Pengurus Karangtaruna melalui Optimalisasi Modal Sosial dalam Pengembangan Desa Wisata. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(1), 32-44.
- Kooiman, J. (2010). Governance and governability. In *The New Public Governance?* (pp. 88-102). Routledge.
- Kooiman, J. (2016). Interactive governance and governability. In *Critical Reflections on Interactive Governance* (pp. 29-50). Edward Elgar Publishing.
- Loupatty, L. G. (2022). Evaluasi Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa /Negeri Di Kota Ambon. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 544-557.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan Desa (SISKEUDES) pada organisasi Pemerintahan Desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578-583.
- Maria Eni Surasih. 2002. Pemerintah Desa dan implementasinya. Erlangga. Jakarta.
- Moleong, L. (2010). Metode penelitian. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Mulyadi, Dedi. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik. PT Alfabeta. Bandung.
- Nurrohmah, K. (2015). Pengaruh Kondisi Kerja, Gaya Kepemimpinan Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV. Nova Furniture Di Boyolali (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Permana, G. P. L., & Mudiyanti, N. W. (2021). Analisis Faktor Kesuksesan Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dengan Menggunakan Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Diperbarui Oleh Delone Dan Mclean Di Kabupaten Gianyar. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(1), 75-85.
- Purnama, D., & Azizah, S. N. (2019). Implementasi sistem keuangan Desa berbasis akuntansi berperilaku. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 160-169.
- Rachmawati, A. M. (2017). Capacity Building Organisasi dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pucang Sewu Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(1), 57-67.
- RAYA. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(1).

- Rodiyah, I., & Sukmana, H. (2021). Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. *PUBLISIA*, 6(1), 32-41.
- Setiawan, H., & Sulisty, N. W. (2021). Strengthening the Capacity of Village Community Institutions through Village-Owned Enterprises in Sumbermulyo Village Bantul, Yogyakarta. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 95-120.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Sulistyowati, S., & Fitriyah, E. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal of social science and Business*, 3(3), 299-305.
- Trisna, N., & Wahyuni, R. (2019). IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA PEMERINTAHAN GAMpong BLANG NEUANG KECAMATAN BEUTONG KABUPATEN NAGAN
- Trisnadewi, A. A. A. E., Amlayasa, A. A. B., & Rupa, I. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dana Desa . *jurnal akuntansi*, 10(1), 37-52.
- Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 152-165.
- Wibowo, R., & Alhalim, A. A. (2018). Teknik Rekrutmen. *Jurnal Tawadhu*, 2(2), 654-664.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2016 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

Internet


<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>

<https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa> .bpbk

<https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/Petunjuk-Pengoperasian-Aplikasi-SISKEUDES> .bpbk

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI

No	Dokumentasi	Keterangan
		<p>Wawancara bersama Kepala Desa Riam Batang</p>
		<p>Pengoperasian aplikasi SISKEUDES</p>

		<p>Musyawarah</p>
		<p>Musyawarah</p>
		<p>Pemberian gaji</p>

PANDUAN WAWANCARA

A. Pengembangan SDM melalui rekrutmen, pelatihan, pengupahan/sistem penggajian, dan kondisi kerja.

1. Pengembangan SDM melalui rekrutmen:
 - a. Bagaimana sistem perekrutan yang dilakukan?
 - b. Apakah memiliki kriteria khusus dalam proses perekrutan?
 - c. Apa kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen?
2. Pengembangan SDM melalui pelatihan:
 - a. Apakah terdapat pelatihan dalam rangka pengembangan SDM?
 - b. Siapa yang menjadi sasaran pelatihan tersebut?
 - c. Apa saja pelatihan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dalam implementasi aplikasi SISKEUDES?
 - d. Bagaimana hasil yang didapat setelah adanya pelatihan?
3. Pengembangan SDM melalui pengupahan/sistem penggajian:
 - a. Bagaimana sistem penggajian di Pemerintah Desa?
 - b. Apakah terdapat reward dalam pemberian gaji?
4. Pengembangan SDM melalui kondisi kerja:
 - a. Apakah terdapat jadwal masuk kantor?
 - b. Bagaimana dengan peraturan jam kerja?

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengimplementasian aplikasi SISKEUDES dilihat melalui faktor komunikasi, sumber daya manusia, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi

1. Faktor komunikasi
 - a. Apakah Pemerintah Desa mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait adanya kebijakan penggunaan aplikasi SISKEUDES
2. Faktor sumber daya manusia
 - a. Bagaimana SDM yang dimiliki Pemerintah Desa Riam Batang
 - b. Bagaimana sarana dan prasarana penunjang penggunaan aplikasi SISKEUDES

3. Faktor sikap

- a. Apakah Pemerintah Desa menerima dengan diterapkannya peraturan tentang penggunaan aplikasi SISKEUDES

4. Faktor struktur birokrasi

- a. Apakah penempatan posisi dalam pemerintah Desa sudah sesuai dengan kapasitas/kemampuannya.

C. Bagaimana sistem pelaporan keuangan yang telah dilakukan

- 1. Apakah Pemerintah Desa sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam pembuatan pelaporan keuangan